

---

# Jalan Menuju Reformasi: Sumba Barat 1999-2000

---

David Mitchell dan Tuti Gunawan

Tulisan ini dipersembahkan untuk Jonathan Donu Bani, yang telah menunjukkan pada kami bagaimana seorang polisi yang berdedikasi mampu mempraktekkan seni mencipta perdamaian di pedesaan Sumba, dan untuk Herb Feith, yang telah menunjukkan pada kami bagaimana seorang ilmuwan yang berdedikasi mampu mempraktekkan seni mencipta perdamaian di dunia yang lebih luas melalui ajaran dan tulisannya.

Seperti yang telah kita lihat pada bagian pertama karangan ini, akhir kepresidenan Soeharto pada bulan Mei 1998 diikuti oleh menajamnya konflik di kalangan elit politik Orde Baru di Kabupaten Sumba Barat. Mobilisasi para pendukung Bupati Rudolf Malo, yang berlatar belakang militer, dan Ketua DPRD-II T.Lero Ora S.H., politisi sipil, memuncak di luar kendali, dan berujung pada peristiwa perang yang disebut *Kamis Berdarah* yang berlangsung sehari pada tanggal 5 November 1998 antara dua kelompok etnik, Wewewa dan Loli. Peristiwa ini menyebabkan lumpuhnya pemerintahan kabupaten secara total selama 48 jam, sampai Gubernur NTT, Piet A.Tallo S.H., dan pasukan Brimob tiba untuk memulihkan kembali ketertiban umum.

Bagian kedua ini akan menggambarkan proses pemulihan ketertiban dan pencarian jalan keluar dari konflik.

## Ringkasan

Rangkaian peristiwa yang kita diskusikan ini dimulai dengan intervensi yang dilakukan oleh Gubernur ketika melakukan kunjungan singkat ke Waikabubak pada tanggal 7-8 November 1998. Meski kepemimpinannya sangat menentukan bagi awal pemulihan fungsi pemerintahan ini, namun yang mengherankan adalah bahwa peran yang dimilikinya ternyata terbatas. Setelah selama 24 jam menyiapkan agenda pemulihan, Gubernur kembali ke Kupang dan meninggalkan Bupati Malo sebagai kepala pemerintahan.

Pergelutan kekuasaan di Waikabubak segera dimulai kembali. Secara bersemangat, para politisi sipil Golkar segera menuntut pengunduran diri atau pemecatan Bupati Malo, sementara Bupati mengorganisir para pendukungnya dari sayap militer dan bersikeras tidak akan melepaskan kekuasaan. Upacara perdamaian akbar diselenggarakan pada tanggal 23 Januari untuk menyudahi suasana permusuhan yang laten antara dua kelompok etnik, Wewewa dan Loli. Tapi, konflik dua kelompok etnik ini pun tergeser oleh perseteruan antara Bupati Malo dan para penentangannya. Perseteruan ini kian terbuka dan mendominasi laporan berita media dari Waikabubak sampai pada waktu Sidang DPRD II pada tanggal 15-18 Februari 1999, di mana dituntut agar Rudolf Malo mempertanggung-jawabkan tindakannya. Ini ditentang dan berakhir dengan pemboikotan oleh Malo serta diwarnai *walk-out* oleh Fraksi ABRI yang beranggota 4 orang. Hal yang memperlihatkan ketidakberdayaan Golkar dan DPRD II dalam melawan militer ini tampaknya berhasil mengendapkan persoalan dan mengalihkan perhatian kepada persiapan Pemilu yang diselenggarakan dalam pertengahan tahun itu.

Pemilu pada tanggal 7 Juni 1999 memunculkan suatu kekuatan baru ke panggung utama politik di Sumba Barat dengan tampilnya PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan) sebagai partai yang memperoleh suara terbanyak. Pemimpin PDI-P, J.L. Keremata, terpilih sebagai Ketua DPRD II. Namun karena PDI-P hanyalah pemegang kursi terbanyak, bukan mayoritas mutlak, tidak berarti bahwa sudah jelas PDI-P yang tidak berpengalaman itu bisa menentukan siapa yang bakal terpilih sebagai Bupati.

Sebagian besar paruh terakhir tahun 1999 itu kemudian didominasi oleh proses uji kelayakan para calon Bupati, sebagai persiapan untuk pemilihan di DPRD II pada bulan April 2000. Di bawah pembaruan-pembaruan konstitusional yang berhasil disahkan selama kepresidenan Habibie, DPRD II yang baru sekarang benar-benar memiliki kekuasaan untuk memilih Bupati baru, dan seorang Wakil Bupati akan dipilih untuk membantunya. Namun, masih muncul keraguan besar bahwa *money politics* atau sesuatu manipulasi politik yang baru akan melemahkan proses pemilihan.

Tetapi, akhirnya pada tanggal 12 April 2000 calon-calon dari PDI-P terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati baru. Tim baru Thimotius Langgar S.H. dari Wewewa sebagai Bupati dan Drs. Julianus Poteleba M.Si. dari Loli sebagai Wakil Bupati jelaslah dipilih untuk menandai langkah baru dan sebagai kepemimpinan penyembuh untuk meneruskan proses pemulihan hubungan Wewewa-Loli. Keduanya juga merupakan tim 'Reformasi', mereka dapat disebut demikian karena gaya hidup mereka, bukan oleh retorika yang mereka ucapkan. Keduanya tidak menjadi kaya dari jabatan yang mereka duduki di ibukota propinsi, Kupang, sehingga muncul harapan besar bahwa mereka bisa membawa standar integritas yang baru ke dalam pemerintahan.

## Tokoh dan Isu

Selagi proses reformasi politik melaju lamban, di Waikabubak banyak bergulir perdebatan hangat tentang apa yang telah terjadi. Bagaimana perguliran tragis ke arah *chaos* pada hari Kamis tanggal 5 November itu bisa terjadi? Bagaimana caranya agar perdamaian sekarang bisa dipulihkan? Kenapa polisi dan tentara sama sekali gagal menjalankan tugas mereka menjaga ketenteraman masyarakat? Dalam banyak hal, diskusi tentang isu-isu ini lebih penting daripada merekam secara rinci rangkaian peristiwa politik. Oleh karenanya, karangan ini juga berikhtiar untuk menangkap esensi diskusi persoalan-persoalan ini.

Peristiwa-peristiwa tersebut tidak hanya dibentuk oleh organisasi dan kelompok kepentingan, tetapi juga oleh pribadi-pribadi yang kuat. Beberapa bagian dalam karangan ini difokuskan pada gagasan dan strategi dari tokoh-tokoh kunci, sejauh mereka bisa dipahami dari tindakan dan pernyataan mereka di muka umum.

## Gubernur Menciptakan Perdamaian

Piet Alexander Tallo, SH adalah pegawai negeri karir yang berpikiran tajam, berhati-hati, kompeten, tindak lakunya tidak membuat kejutan. Ia dilahirkan di Tepas, di Timor Tengah Selatan (TTS), besar

di Timor, dan lulus sebagai sarjana hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Karirnya di kantor propinsi di Kupang naik menjadi Kepala Bidang Pendapatan, menjadi Sekwilda (Sekretaris Wilayah Daerah) di TTS selama dua periode, sebelum beralih ke jabatan yang bersifat politik dengan menjadi Wakil Gubernur NTT selama 5 tahun.<sup>1</sup> Dari Wakil Gubernur, dia naik sebagai orang sipil yang menggantikan seorang militer, dan menjadi Gubernur NTT pada bulan Juli 1998.<sup>2</sup>

Ia memulai jabatannya sebagai Gubernur dengan reputasi sebagai orang yang memiliki integritas dan ia pada umumnya tidak sampai dituduh korupsi.<sup>3</sup> Ketika masih menjabat sebagai Wakil Gubernur, para wartawan yang menyingkap berbagai kasus korupsi dapat memintanya untuk turun tangan. Namun, seringkali ia turun tangan dengan syarat bahwa persoalan itu tidak diberitakan di surat kabar.<sup>4</sup> Ia adalah seorang yang lebih suka berkompromi daripada berkonfrontasi, dan tindakannya yang hati-hati itu melindungi citra pemerintah. Tingginya profesionalisme yang ia mainkan ketika berperan sebagai Gubernur mungkin paling jelas terlihat dalam transisinya yang mulus, dari orang yang diterima sebagai bagian pemerintah Orde Baru, dan sekarang menjadi bagian Reformasi.<sup>5</sup>

Ketika Gubernur Tallo tiba di Waikabubak pada hari Sabtu 7 November, Rudolf Malo baru saja kembali dari pengungsian di markas polisi ke rumah dinas, kebetulan tepat pada waktu Gubernur tiba. Gubernur Tallo langsung mengambil alih pimpinan dan menguraikan rencananya untuk keluar dari krisis ini. Dalam pembicaraan pribadinya dengan Bupati Malo, ia menunjukkan bahwa tindakan Malo yang meninggalkan tempatnya dan secara efektif berhenti berfungsi sebagai Bupati selama dua hari penuh bisa dilihat sebagai suatu kesalahan yang serius. Untuk menghindari tuduhan pengecut, ia menyarankan agar Bupati Malo mengatakan pada pers bahwa ia pergi ke Markas Polisi untuk mendirikan pusat pos koordinasi (Posko). Tampaknya Malo enggan patuh pada saran seorang sipil. Ia berbicara dengan pers nasional yang datang bersama Gubernur, tetapi memberikan penjelasannya sendiri. Ia mengatakan bahwa semua staf dapur rumah Bupati telah mengungsi ke kompleks kepolisian, sehingga ia harus mengikuti mereka agar dapat makan.<sup>6</sup>

Sikap menentang yang lebih berarti terhadap Gubernur yang dilakukan oleh Malo terlihat dalam penanganan jenazah korban dari Wewewa. Persoalan ini telah memicu banyak kemarahan karena jenazah-jenazah tersebut dibiarkan di tempat terbuka selama sekitar 24 jam, kemudian dikumpulkan dengan cara ditumpuk begitu saja dalam bak truk sampah.<sup>7</sup> Gubernur Tallo berencana menghormati martabat korban dengan mengembalikan jenazah korban kepada keluarganya dan telah memesan peti mati dari kayu, yang masing-masing akan ditutupi kain adat.<sup>8</sup> Bupati Malo mengatakan bahwa langkah ini sudah terlambat, karena jenazah korban sudah dikembalikan kepada keluarga mereka masing-masing. Ini tidak benar, tapi tidak jelas apakah Malo berupaya menyembunyikan kelambanan tindakan yang diambilnya dan berupaya tetap memegang kontrol atas proses yang terjadi, ataukah hanya karena salah informasi.<sup>9</sup>

Meski di kalangan sendiri ia mengancam Malo, namun di depan umum Gubernur Tallo lebih memusatkan perhatian pada pemulihan keamanan dan melindungi martabat pemerintah. Seruan yang menuntut pengunduran diri Malo dimulai oleh delegasi pemuda yang siap bertemu dengan Gubernur segera sesudah ia tiba di Waikabubak. Gubernur hanya menjawab bahwa kekuasaan untuk memecat Bupati tidak berada dalam

tangganya, melainkan dalam tangan Menteri Dalam Negeri di Jakarta.<sup>10</sup> Semua prosedur akan dilakukan secara seharusnya dan pada waktunya langkah yang tepat akan diambil, demikian jaminan Bupati kepada delegasi pemuda tersebut. Gubernur Tallo mengemukakan secara ringkas prioritasnya untuk membayar ganti rugi kepada para korban peristiwa Kamis Berdarah, dan mempersiapkan upacara perdamaian antara Wewewa dan Loli. Kemudian, setelah menentukan agenda perdamaianya, ia kembali ke Kupang, dan meninggalkan Brimob di Sumba Barat sebagai lapis keamanan tambahan selama periode yang rawan ini.

Hanya selang tiga minggu kemudian, pada tanggal 30 November, muncul peristiwa yang mengingatkan bahwa insiden Waikabubak tidak dapat sepenuhnya dipahami terpisah dari tragedi kekerasan yang meluas di seluruh wilayah Indonesia pada waktu itu. Gubernur Tallo harus berhadapan dengan krisis sendiri ketika muncul serangan yang terkoordinir yang diarahkan pada beberapa mesjid dan madrasah di Kupang, sebagai respons terhadap serangan atas gereja-gereja di Jakarta seminggu sebelumnya. Sekali lagi, pecahnya kekerasan ini terjadi selama satu hari saja dan Gubernur dan polisi segera mampu memulihkan ketertiban. Namun masyarakat seolah diingatkan bahwa Gubernur menghadapi banyak masalah yang rumit dan juga memiliki keterbatasan, yang mempengaruhi kemampuannya mengendalikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Sumba Barat.<sup>11</sup>

Meski demikian, Gubernur Tallo tetap aktif terlibat dalam upaya pemulihan hubungan antara masyarakat Wewewa dan Loli. Sepuluh minggu kemudian, pada tanggal 23 Januari, ia kembali ke Waikabubak untuk memimpin upacara perdamaian. Ia pun secara aktif mencurahkan perhatian pada persoalan kompensasi kepada para korban peristiwa Kamis Berdarah itu dan pada upaya pemberantasan korupsi dalam pengangkatan pegawai negeri yang telah menjadi pemicu penajaman konflik itu.

Kemampuan Gubernur Tallo untuk mengambil langkah intervensi yang menentukan, yang mengakhiri terjadinya kekerasan, adalah tindakan yang merupakan ciri tiga peristiwa di NTT pasca kejatuhan Soeharto. Ketiga peristiwa kekerasan itu, di Ende pada tanggal 8 Februari 1998, di Waikabubak pada 5 November 1998, dan di Kupang pada 30 November 1998, mempunyai banyak kesamaan. Dalam semua kasus tersebut, aktivitas perdamaian yang dilakukan oleh Gubernur memiliki elemen-elemen kunci yang ditemukan dalam kasus Waikabubak, yaitu (1) kesigapan intervensi, (2) mengirim Brimob, (3) tidak berpihak, melainkan berdiri di tengah-tengah, (4) memberi ganti rugi kepada korban jika terjadi kematian atau hilangnya harta benda, dan (5) memproses secara hukum semua pelanggaran jika bisa diidentifikasi.<sup>12</sup>

Intervensi oleh Gubernur Piet Tallo dan pendahulunya, Herman Musakabe, jelas berjalan sukses. Namun keberhasilan ini (i) bergantung pada situasi tertentu, dan juga (ii) sangat terbatas dalam apa yang dapat tercapai. Seperti di Waikabubak, kasus Ende dan Kupang secara luas diyakini muncul karena konflik antar elit, di mana tokoh-tokoh elit dengan sengaja memobilisasi massa untuk melakukan kekerasan demi memenuhi tujuan-tujuan politik mereka.<sup>13</sup> Hal ini hanya bisa terjadi jika para sponsor kekerasan tersebut yakin bahwa pers tidak akan membuka hal ini dan mereka terlindung dari jeratan hukum. Akibatnya, sama dengan kasus Waikabubak, dalam kasus Ende dan Kupang persoalan utama adalah sangat sulitnya memperoleh bukti-bukti yang bisa menjadi landasan penelitian.<sup>14</sup>

Dari pandangan ini, tujuan sponsor kekerasan adalah untuk memprovokasi insiden kekerasan yang berlangsung singkat, bukan perselisihan yang berlangsung terus-menerus. Pertimbangan-pertimbangan ini bisa memberi penjelasan mengapa Gubernur dengan gampang bisa berdiri di atas semua konflik tersebut dan dengan cepat mengembalikan perdamaian, namun tidak mampu menghukum atau menjatuhkan sanksi kepada mereka yang menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut.

Jika peran Gubernur ternyata tidak terlalu menentukan daripada yang disangka pada mulanya, lantas kekuatan-kekuatan manakah yang membantu pemulihan perdamaian di Sumba Barat?

## Berbagai Kekuatan Bekerja Memulihkan Perdamaian

Pemakaian label 'perang antar-etnik' mendorong orang berpikir dalam pengertian konflik sengit yang tak habis-habisnya. Pengertian ini gampang diungkapkan, namun sebenarnya menyesatkan dalam kasus Kamis Berdarah.

Sumba Barat sudah merupakan masyarakat pluralis yang kompleks, di mana identitas etnik berjaln berkelindan dengan dimensi identitas lainnya. Bahkan orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin tradisional dalam masyarakat Wewewa dan Loli juga merasa menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat agama, masyarakat regional dan nasional yang lebih luas, yang melintasi batas-batas etnik. Banyak orang lebih merasa sebagai orang Kristen, orang Sumba atau Indonesia daripada orang Wewewa atau Loli. Perkawinan antar-kelompok etnik di wilayah Sumba juga sudah menjadi biasa, dalam keluarga-keluarga tradisional sekalipun. Dan di wilayah perbatasan antara Loli dan Wewewa, perkawinan semacam ini lebih lazim lagi terjadi.<sup>15</sup>

Jadi, meski loyalitas etnik memang bisa dibangkitkan kembali, sedari awalnya proses polarisasi berdasarkan garis etnik itu secara keras ditentang oleh para pemimpin adat masyarakat Loli dan Wewewa yang memiliki horison dan kesetiaan yang jauh melampaui wilayah desa lokal. Banyak juru ulas menolak gagasan bahwa kelompok-kelompok itu membentuk suku terpisah, sebagian di antara mereka lebih menyukai penggunaan istilah "*sub-etnik*" dan sebagian lainnya menunjukkan bahwa semua orang Sumba sebenarnya berasal dari leluhur yang sama.<sup>16</sup>

Berbeda dengan situasi kompleks yang terjadi di Aceh, Papua, Maluku, Kalimantan dan peristiwa kekerasan anti-Tionghoa atau anti-Kristen di Jawa, di Sumba Barat tidak ada benturan keagamaan atau budaya yang keras yang memisahkan Wewewa dan Loli. Di daerah ini juga tidak ada isu penguasaan sumber daya ekonomi yang memperkeruh konflik di daerah-daerah lainnya. Kendati persaingan untuk memperebutkan jabatan Bupati sebagai sumber kemakmuran dan kekuasaan menjadi inti persoalan peristiwa Kamis Berdarah, hal ini hanya menjadi persoalan penting bagi mereka yang berhubungan dekat dengan Bupati Malo dan tidak menjadi perhatian masyarakat Loli dan Wewewa umumnya. Bahkan tuduhan bahwa Malo lebih suka mendudukkan orang-orang Wewewa dan teman-temannya di kursi pegawai negeri senior harus diimbangi

dengan fakta bahwa semua kelompok etnik di Sumba Barat cukup terwakili di berbagai posisi junior maupun senior. Meski Bupati Malo dianggap sebagai seorang yang giat melakukan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), namun kemarahan terhadapnya berdasarkan alasan ini ditumpulkan oleh kenyataan bahwa yang dilakukannya tidak banyak berbeda dari yang dilakukan para pendahulunya, dan setiap kali suatu kelompok etnik mendapat giliran berkuasa, hal yang sama pun terjadi, sehingga lambat laun keadaan akan berimbang.

Karena tidak adanya perpecahan sosial yang tajam, hampir semua elit pemimpin di pemerintahan, kelompok bisnis, maupun gereja sangat memahami bahwa hanya kerugianlah yang akan dibawa oleh konflik Wewewa-Loli ini bagi kepentingan sosial, ekonomi, dan politik mereka. Dan begitu persoalan sudah mereda, mereka menyiapkan segala kemampuan mereka, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, untuk mewujudkan kembali situasi yang normal.

Ada juga sekelompok yang cukup besar dari orang-orang Sumba terpelajar yang bekerja di Kupang dan Jakarta, dan banyak di antara mereka yang melibatkan diri ke dalam upaya mediasi dan mendukung usaha menciptakan kedamaian. Sebagian besar orang-orang ini tidak memiliki hubungan dengan politik lokal di Waikabubak dan menolak memberikan dukungan yang bersifat memihak kepada kelompok etnik tertentu. Di Kupang, IKAS (Ikatan Keluarga Sumba) memainkan peran aktif dalam mengirimkan misi penyelidikan ke Sumba dan menawarkan saran dan dukungan moral kepada Gubernur Tallo.<sup>17</sup>

Namun, sangat penting pula peran para pemimpin tradisional di pedesaan yang telah berhasil mencegah mobilisasi seluruh warga Wewewa dan Loli untuk berperang satu sama lain. Mobilisasi yang dilakukan terbatas pada markas pengikut Bupati Malo dan Ketua Lero, dan kebanyakan merupakan mobilisasi keluarga besar dan para pendukung kedua tokoh tersebut, dan bukannya mobilisasi kedua golongan etnik secara keseluruhan. Baru pada akhir proses mobilisasi, ketika keadaan memuncak di luar kendali pada hari Rabu 4 November, peristiwa ini mulai menarik loyalitas etnik dan merekrut masyarakat di luar keluarga besar dan pendukung kedua tokoh tersebut. Pada puncak tragedi di hari Kamis pagi, sebagian yang cukup besar dari masyarakat Loli membuat tindakan balasan karena merasa kampung induk mereka, Tarung, akan diserang oleh orang-orang Wewewa. Tetapi serangan ini lebih merupakan hasil kerja tim-tim provokator yang sebelumnya telah membakar habis banyak kampung Loli, dan sebagian lainnya menantang dengan tarian perang di kaki kampung Tarung. Namun sebagian besar orang-orang Wewewa yang melakukan penyerbuan sebenarnya hanya bermaksud merebut kembali dan mempertahankan rumah mereka sendiri, dan tidak pernah ikut serta dalam rencana menyerang Tarung.

Dalam situasi seperti ini, tidak mengherankan apabila reaksi sebagian besar masyarakat, baik di Loli maupun di Wewewa adalah tidak ingin meningkatkan kekerasan lebih lanjut, melainkan mundur dengan rasa ngeri dari tragedi yang telah terbentang itu.

## Peran Kepemimpinan Tradisional

Pada bagian pertama kami telah menunjukkan adanya sekelompok orang dalam barisan Wewewa, yang begitu mengetahui kampung-kampung Loli terbakar segera meninggalkan barisan Wewewa untuk melindungi kampung tempat tinggal saudara-saudara mereka dari Loli. Tapi kejadian ini hanyalah salah satu dari sekian banyak contoh tindakan sigap yang diambil untuk menghentikan eskalasi kekerasan.

Di daerah perbatasan di mana keluarga-keluarga Wewewa dan Loli hidup berbaur, banyak keluarga Wewewa di kampung Mareda Kalada yang memberikan tempat pengungsian dan perlindungan kepada tetangga mereka dari Loli. Lebih menonjol lagi adalah perlindungan yang diberikan oleh penduduk Loli kepada tetangga mereka dari Wewewa di kampung Waikarou, yang termasuk wilayah Loli.

Pada tanggal 4 November, Jewu Lango, mantan Kepala Desa Waikarou pergi berburu babi liar, kegiatan tradisional yang dilakukan setiap tahun pada bulan November. Ketika tiba kembali di rumahnya yang terletak di bagian selatan kota Waikabubak pada pukul 4 sore, ia melihat banyak orang Wewewa yang mengungsi meninggalkan Waikabubak. Lango sudah secara resmi tidak lagi menjadi Kepala Desa sebagai bagian dari restrukturisasi pemerintahan desa yang menempatkan para pegawai karir yang berijazah sebagai Lurah untuk menggantikan Kepala Desa yang dipilih berdasarkan karisma dan kemampuan kepemimpinan yang mereka miliki. Jadi Kepala Lango tidak lagi memiliki otoritas resmi, namun pertimbangan ini tidak menghentikannya untuk mengambil tindakan secara sigap. Ia menyatakan bahwa semua orang Wewewa yang hidup di Waikarou harus dilindungi oleh tetangga-tetangga mereka orang Loli. Ia mengirim orang-orang ke seluruh pelosok desa untuk menyampaikan pernyataannya itu dan kemudian berangkat sendiri menuju Sekolah Menengah Kejuruan di Kuriteppe, yang masih termasuk ke dalam wilayah Waikarou tetapi terletak dekat perbatasan, untuk memastikan agar murid-murid yang tinggal di asrama sekolah itu tetap aman.

Secara kebetulan, Lango tiba di Sekolah Kuriteppe bersamaan dengan kedatangan Kepala Desa Mareda Kalada, yang termasuk wilayah Wewewa. Kepala Desa Mareda Kalada itu pun datang untuk mengecek keselamatan murid-murid yang berasal dari Wewewa yang tinggal di asrama sekolah itu. Kedua orang tersebut berpikiran sama dan segera bersepakat bahwa mereka akan menjunjung tinggi upacara perjanjian perdamaian yang digelar di Wone pada tahun 1975 dan dengan tegas menolak tuntutan untuk menyeret desa mereka ke dalam kekerasan. Kedua desa ini berhasil menjaga perdamaian di perbatasan selatan Wewewa-Loli, sehingga hanya bagian utara perbatasan yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok provokator untuk melancarkan aksinya.

Pada saat ketika kedua Kepala Desa Waikarou dan Mareda Kalada kembali mempertegas perdamaian di antara kedua desa mereka, Bupati Malo dan Dandim Mulyadi bekerja keras untuk merebut kembali kontrol atas situasi. Namun kedua pejabat itu melakukannya tanpa memanfaatkan tokoh-tokoh pemimpin tradisional yang berpengalaman dalam memobilisasi dan mengorganisir penduduk desa mereka.<sup>18</sup>

Demikianlah terjadi bahwa di tengah suasana yang mencekam di Wewewa, tengah malam tanggal 4 November Bupati Malo berdiri di atas atap kendaraannya dengan Dandim Mulyadi di sampingnya, untuk

membujuk secara langsung kerumunan orang dengan menggunakan segala perangkat rasional dan emosional yang dia miliki. Tindakan ini memang tindakan yang berani, namun memperlakukan penduduk desa seolah-olah mereka kerumunan yang tidak memiliki pimpinan, yang hanya didorong oleh desas-desus dan reaksi emosional, terbukti merupakan strategi yang gagal. Kerumunan massa tidak terpengaruh oleh retorika Malo. Himbauannya untuk tenang dengan mudah dibantah oleh orang-orang lainnya yang berdiri dan menjawabnya secara pedas, bahwa yang dirusak oleh orang-orang Loli bukanlah rumah Malo, dan karena otoritasnya sebagai Bupati terbukti tidak mampu melindungi orang-orang Wewewa yang tinggal di kota, kenapa orang-orang Wewewa harus menghormati otoritasnya sekarang.<sup>19</sup>

Penolakan terhadap otoritas Bupati Malo ini tidak muncul dari tokoh-tokoh pemimpin tradisional Wewewa, melainkan dari keluarga dekatnya sendiri. Penolakan itu datang dari sekelompok anak muda yang belum berpengalaman, yang seharusnya tunduk kepada Malo sebagai saudara tuanya, tapi mereka berbicara secara emosional tanpa disertai pertimbangan matang dan hati-hati yang biasanya diperoleh dari pengalaman memimpin. Keberadaan Dandim Mulyadi di sampingnya hanya mengingatkan masyarakat bahwa sebagian besar karir Rudolf Malo dijalani di luar pulau kelahirannya dan ia telah kehilangan hubungan dengan tradisi Sumba dan perasaan Sumba. Para pemimpin tradisional Wewewa yang seharusnya, dan sebenarnya bisa, berdampingan dengan Bupati Malo untuk berbicara mencegah ketololan invasi massa ke Loli, tidak ditampilkan disitu.<sup>20</sup>

Sekarang pasca peristiwa Kamis Berdarah, pemimpin-pemimpin tradisional menjadi elemen yang ampuh dalam mengembalikan ketenangan. Meski kebanyakan pemimpin tradisional bertindak berdasarkan persepsi mereka sendiri mengenai kepentingan terbaik masyarakat mereka, mereka dapat mengatakan bahwa pendapat mereka sejalan dengan sikap Gubernur, dan hal ini memperkuat sudut pandang mereka. Hal ini terutama diperlukan dalam situasi di mana wibawa Bupati Malo dan Ketua Lero telah melemah karena peristiwa kekerasan itu.

Keberhasilan kepemimpinan tradisional ini tidak diliput oleh pers. Para wartawan surat kabar, yang semuanya berasal dari luar Sumba, telah terjerembab ke dalam kebiasaan terlalu banyak bersandar pada para informan di lingkaran elit politik, dan khususnya pada Bupati Malo sendiri, yang biasa berbicara dengan gaya tegas sehingga kutipan kata-katanya mudah menarik pembaca.

Karena hal ini, para wartawan tidak melihat berbagai elemen penting dalam kisah ini, yang sebenarnya dapat diceritakan oleh penduduk biasa kepada mereka. Karena tidak mendengarkan penjelasan penduduk desa tentang keadaan sebenarnya, para wartawan tidak bisa memberikan penjelasan yang logis tentang apa yang telah terjadi. Untuk mengisi kesenjangan ini mereka membesar-besarkan pentingnya loyalitas etnik yang purbawi dan irasionalitas perilaku massa.<sup>21</sup> Mereka luput melaporkan peran kunci dari kepemimpinan tradisional dalam membatasi kekerasan, dan gagal membedah peran kelompok provokator dalam meruncingkan konflik.



## Pihak Kepolisian Terhimpit di Tengah-Tengah

Posisi polisi hampir sama sulitnya dengan posisi Bupati Malo. Setelah pecahnya Kamis Berdarah, banyak penduduk Loli dan Wewewa yang diam-diam mencibir mereka. Polisi dan tentara, yang tidak besar jumlahnya itu, memiliki monopoli senjata api, dan juga dilengkapi dengan kendaraan bermotor, *walkie-talkie*, dan telah memperoleh semua pelatihan dan disiplin pasukan profesional. Tapi mereka mula-mula gagal dalam mencegah perusakan yang dilakukan warga Loli terhadap rumah orang-orang Wewewa yang ada di kota, dan kemudian gagal mencegah serangan balasan dari Wewewa. Setelah dibiarkan menghadapi pasukan Wewewa yang pada mulanya jauh lebih besar, warga Loli terpaksa melawan dan akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Wewewa itu dengan hanya menggunakan parang dan tombak, senjata yang juga digunakan oleh orang-orang Wewewa.<sup>22</sup>

Tidak sedikit penduduk desa yang mengklaim bahwa polisi bersekongkol dengan Bupati Malo, dan bahwa kedua pihak itu dengan sengaja berlepas tangan sampai para pendukung Malo dari Wewewa berhasil menyerbu dan menghukum Loli. Kepala Polisi mengatakan bahwa jika pasukan Wewewa merangsek masuk ke pusat kota, polisi pasti akan menghentikannya di depan kantor polisi. Setidaknya pernyataan ini mengakui bahwa polisi seharusnya turun tangan, tapi pernyataan yang mengutarakan niat yang baik itu tidak banyak memperbaiki reputasi mereka.

Meskipun demikian, para elit dan penduduk kota tidak banyak mengutuk kegagalan polisi dalam menghentikan barisan penyerbu dari Wewewa itu. Banyak penduduk kota yang bersyukur bahwa polisi dan tentara telah membuka markas mereka untuk memberikan tempat pengungsian kepada siapapun yang datang ke sana. Acapkali mereka tidak banyak berharap pada kemampuan polisi, dan mereka pun memaklumi bahwa polisi telah diintimidasi oleh massa berjumlah besar yang sebelumnya telah menentang Bupati dan Dandim ketika mereka berdua berusaha terakhir kalinya pada pukul 4 pagi untuk menghentikan barisan yang menyerbu ke kota.<sup>23</sup>

Sebenarnya polisi telah mulai mengambil tindakan yang layak dan terhormat ketika menghadapi demonstran Wewewa bersenjata yang pertama kali terjadi pada hari Senin tanggal 2 November. Ketika itu polisi menghentikan 10 truk dan melucuti senjata lebih dari 500 orang pendukung Bupati Malo, dan memisahkan mereka agar tidak terjadi demonstrasi tandingan.

Bahkan pada hari Rabu tanggal 4 November, ketika kewibawaan polisi ditantang terang-terangan oleh kerumunan massa Loli yang memenuhi kota dan menyerang rumah orang-orang Wewewa yang dekat dengan Bupati, polisi telah cukup berhasil. Di kota kecil seperti Waikabubak, tiap anggota polisi biasanya dikenal oleh penduduk, dan sebaliknya polisi mengenal banyak orang di dalam kerumunan itu. Jadi beberapa polisi yang dihormati mampu memegang kontrol di tempat mereka bertugas, sementara di tempat lainnya massa secara terang-terangan menentang polisi lainnya yang dianggap arogan dan korup. Polisi yang benar-benar memegang kontrol biasanya melakukannya tanpa mencabut pistol mereka dari sarungnya. Penggunaan senjata itu sendiri bisa berbalik merugikan jika salah seorang yang marah di dalam kerumunan massa menantang polisi

tersebut untuk menembaknya, kalau ia berani.<sup>24</sup> Cara pengamanan yang berwibawa ini banyak mempertahankan kepercayaan orang kepada polisi, meski adanya kegagalan-kegagalan yang menyolok.

Opini elit di Waikabubak umumnya tidak mengecam Kapolres, Letkol (Pol) Drs. S.M. Simatupang. Struktur komando dalam Muspida membuat Kapolres hanya memiliki satu suara di dalam tim yang seharusnya bekerja sama di bawah kepemimpinan Bupati. Bupati dianggap sebagai Penguasa Tunggal, sungguhpun misalnya ia dari kalangan sipil, apa lagi dalam hal ini Bupati Malo berasal dari kalangan militer. Beberapa narasumber mengatakan bahwa Dandim Mulyadi tampaknya cukup puas menjadi Letnan Kolonel (Inf.) yang setia mengikuti kepemimpinan Kolonel (AU) Malo, sedangkan Simatupang kelihatan tidak begitu nyaman menjadi seorang pengikut, meski ia memiliki pangkat yang sejajar dengan Dandim Mulyadi dalam hirarki militer sebagai Letkol (Pol). Narasumber lainnya mengatakan bahwa salah satu kesulitan posisi Simatupang adalah manakala massa bertambah banyak dan beringas, polisi akan sukar mempertahankan kontrol. Dan jika polisi terpaksa melepaskan tembakan, dan ada orang sipil yang terbunuh, Kapolres harus yakin benar bahwa ia akan mendapat dukungan dari Bupati.

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa dalam tubuh kepolisian ada berbagai kelompok. Para perwira polisi senior, yang berasal dari Jawa, Sunda atau Sumatra, lebih bersikap mendukung Bupati Malo, sementara polisi yang asli Sumba dan daerah-daerah lain di NTT lebih memusatkan perhatian pada upaya menjaga perdamaian dan mempertahankan ketertiban umum.<sup>25</sup> Umumnya para perwira yang dari kecil tinggal di NTT memiliki pemahaman yang jauh lebih baik mengenai cara hidup dan cara berfikir orang Sumba. Polisi yang berencana pensiun di Sumba lebih mementingkan reputasi yang baik dalam masyarakat lokal. Polisi yang berasal dari luar NTT lebih gampang dikooptasi untuk mendukung Bupati.

Jadi, hilangnya wibawa polisi tidak merata akibatnya terhadap pihak kepolisian secara keseluruhan. Namun biasanya para perwira yang lebih seniorlah, yang berasal dari luar NTT, yang akan membuat keputusan tentang siapa yang akan dituntut dan siapa yang tidak.

## Upacara Perdamaian Gaya Orde Baru

Sementara itu, dilakukan berbagai persiapan upacara perdamaian resmi yang akan diselenggarakan di tempat balapan kuda dan stadion sepakbola di Waikabubak. Upacara ini baru akan diselenggarakan di akhir Januari, namun kebetulan sebelumnya muncul sejumlah peristiwa yang memuluskan momentum menuju penyelesaian damai.

Pada tanggal 27 November, rangkaian pertama pembayaran kompensasi diwujudkan untuk keluarga yang kehilangan anggota keluarganya akibat peristiwa 5 November itu. Baik Bupati Malo dan Ketua Lero Ora ikut serta dalam acara ini, dan setiap keluarga diberi uang sejumlah 2 juta rupiah dan kain adat. Hal yang cukup mengherankan adalah ketika wakil-wakil keluarga korban berpidato dengan hati yang lapang dan penuh maaf, lebih mengekspresikan penyesalan daripada kemarahan, dan mengatakan bahwa penderitaan mereka diringankan oleh penghormatan yang diberikan kepada mereka, terutama oleh kehadiran Lero Ora

dalam acara itu. Kehadiran Lero Ora dianggap sebagai mewakili masyarakat Loli, bukan sebagai Ketua DPRD II, dan mereka menyerahkan pesan perdamaian kepadanya untuk disampaikan kepada masyarakat Loli. Rudolf Malo juga berpidato secara mengharukan, dengan mengatakan sesalnya, “Karena sayalah kalian menderita. Kalian berhak marah kepada saya”.<sup>26</sup>

Polisi juga melakukan penyelidikan dan pada tanggal 9 November mereka mengumumkan bahwa mereka telah menahan 11 orang yang diduga terlibat dalam perampokan rumah orang-orang Wewewa.<sup>27</sup> Mereka menjelaskan bahwa aksi perampokan ini “murni bersifat kriminal”, tidak disertai muatan politik.<sup>28</sup> Jelaslah bahwa proses hukum akan sangat terbatas, tetapi walaupun begitu banyak kasus yang memang perlu dikategorikan sebagai aksi kriminalitas, dan tindakan polisi yang cepat ini juga melegakan para korban yang berasal dari Wewewa.

Tim-tim pencari fakta dari Kupang juga datang dan mencoba memahami apa yang telah terjadi dari sudut pandang politik dan sosial. Pemerintah propinsi mengirim dua tim, demikian juga organisasi masyarakat se-Sumba, IKAS (Ikatan Keluarga Sumba), yang menyatukan orang-orang Sumba dari semua kelompok etnik. Kedua kelompok ini adalah kelompok konservatif dan setelah secara seksama menimbang rantai konflik yang kompleks, seperti diuraikan dalam bagian pertama tulisan ini, mereka memberikan dukungan penuh kepada strategi yang diambil oleh Gubernur Tallo.

Inti agenda Gubernur adalah terselenggaranya upacara perdamaian, dan berbagai rencana untuk upacara ini secara bertahap dimatangkan. Tidak ada yang menentang gagasan ini, namun terjadi perbedaan pandangan yang sengit tentang langkah-langkah apa yang perlu diselesaikan agar upacara itu menjadi upacara yang penuh arti. Salah satu tujuan utama dari sudut pandang Rudolf Malo adalah agar upacara perdamaian itu dilakukan sebelum Sidang DPRD II yang akan dilangsungkan pada bulan April, sehingga persoalan konflik tersebut bisa dinyatakan selesai jika isu itu dimunculkan di dalam forum DPRD. Pada akhirnya, kebanyakan isu-isu ini dibiarkan mengambang tanpa penyelesaian atau disembunyikan agar upacara perdamaian itu bisa diselenggarakan.

Upacara itu dimaksudkan untuk mendamaikan masyarakat Wewewa dan Loli, sehingga sebisa mungkin dilakukan menurut tradisi Sumba. Namun, tetap muncul sejumlah penyimpangan dari tradisi karena beberapa isu penting yang harus dihadapi dalam mengadakan upacara tradisional, tetapi yang tidak bisa diterima oleh ‘manajer-manajer politik’ dari upacara perdamaian itu karena konsekuensi politiknya.

Salah satu aspek utama yang sengaja tidak dimunculkan adalah pemberian kompensasi kepada keluarga korban yang tewas. Dalam tradisi Sumba yang tidak mengenal negara, pihak-pihak yang bertikai selalu dipimpin oleh individu tertentu, dan kompensasi untuk korban yang mati selalu menjadi tanggung jawab orang yang mensponsori perang. Jika cara ini dipakai, Bupati Malo dan keluarganya akan dituntut untuk bertanggung jawab dan mengembalikan jenazah korban kepada keluarganya dengan diiringi seekor kerbau dan selembar kain adat. Jelas bahwa hal ini mustahil dilakukan dalam pengertian politik kontemporer, sehingga tradisi ini harus dikesampingkan. Pembayaran kompensasi kepada keluarga korban sebagian besar dilakukan

oleh negara dan sering diserahkan oleh Rudolf Malo dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan, tetapi dilakukan sedemikian rupa guna menjauhkan kesan peran sponsor perang.<sup>29</sup>

Persoalan lainnya menyangkut simbolisme religius yang harus dipakai. Salah satu ritual utama dalam menyelesaikan masalah dalam kerangka tradisi adalah pemanggilan arwah orang Wewewa yang tewas, yang dianggap dibiarkan terlantar di Loli dan perlu diajak pulang ke Wewewa. Sayangnya, upacara yang pada dasarnya bersifat animis ini tidak sesuai dengan agama resmi dalam format Orde Baru yang hanya mengakui lima agama modern. Meski para pemimpin agama setempat memasukkan dan menerima pemimpin-pemimpin animisme ke dalam upacara itu<sup>30</sup>, namun acara resmi tidak memberi ruang pada religiositas animisme yang dianut oleh keluarga korban dari Wewewa. Protes masyarakat diabaikan dan pemanggilan arwah korban tewas tidak dilakukan.<sup>31</sup> (Persoalan ini dibiarkan mengambang tanpa penyelesaian dalam upacara bulan Januari 1999 itu, namun beberapa upacara yang baru untuk memanggil arwah korban tewas dan mengantarkan arwah tersebut pulang ke Wewewa diselenggarakan pada bulan April 2001<sup>32</sup>).

Wakil-wakil agama yang resmi pun tak luput menyulitkan para penyelenggara upacara. Pernyataan umum yang mereka keluarkan secara tajam mengecam kegagalan pemerintah yang telah memungkinkan tragedi itu terjadi dan dengan tegas menuntut agar orang-orang yang bertanggung jawab diseret ke depan pengadilan.<sup>33</sup> Bahkan di balik layar para pemimpin keagamaan itu bersikap lebih keras lagi dengan menyatakan bahwa mereka tidak akan memimpin upacara jika mereka yang bertanggung jawab atas terjadinya berbagai aksi kejahatan yang telah menyebabkan tragedi itu tidak dibawa ke pengadilan.<sup>34</sup> Mereka tidak akan ikut serta dalam upacara yang membawa penyelesaian secara prematur dan mencegah investigasi menyeluruh. Hal ini merupakan ganjelan penting karena Rudolf Malo tidak akan membiarkan dirinya diidentifikasi sebagai sponsor demonstrasi bersenjata yang dilakukan oleh keluarganya pada tanggal 2 November, dan ia harus tetap menyembunyikan semua kaitan yang mungkin muncul antara para pendukungnya dengan serangan terhadap Keba Moto di pasar Ombarade, atau dengan pembakaran kampung-kampung Loli.

Pada awalnya tampak kompromi tidak mungkin tercapai mengenai persoalan ini dan ketegangan kian memuncak. Akhirnya, para pemimpin keagamaan mulai terpecah karena tekanan pemerintah dan mereka menerima janji pemerintah bahwa investigasi akan dilakukan setelah upacara perdamaian. Timbul banyak kekecewaan di antara para pengikut mereka yang mengetahui bahwa janji seperti itu tidak bakal dipenuhi.<sup>35</sup>

Kendati adanya berbagai persoalan tersebut, upacara perdamaian tetap diselenggarakan dengan sambutan hangat pada hari Sabtu, 23 Januari 1999. Gedung stadion utama di Waikabubak dipenuhi lebih dari 5000 orang yang menghadiri upacara itu. Juga hadir dalam upacara tersebut Gubernur beserta isteri, seluruh Muspida NTT dan kontingen dari Makassar yang mewakili Angkatan Udara. Tradisi Sumba versi pemerintah ini merupakan acara yang megah. Dilakukan penyembelihan kerbau dan babi besar, masing-masing pihak yang bertikai saling tukar-menukar kain adat, parang dan tombak; tambur dan gong ditabuh, dan sorak sorai dan pekikan tradisional memenuhi angkasa.<sup>36</sup>

Dari sudut pandang Gubernur dan Bupati, upacara tersebut merupakan sukses besar. Dalam banyak hal kepentingan mereka berdua saling bertemu di sini. Bupati Malo telah meminta maaf atas kegagalannya dalam memimpin dan berbagai kelemahan lainnya yang tidak disebutkannya,<sup>37</sup> dan ia melakukannya dalam satu forum di mana permintaan maafnya diterima dan ia tetap mendapat kesempatan untuk memegang kekuasaan. Wakil-wakil resmi dari kedua kelompok etnik telah memberi sinyal-sinyal rekonsiliasi, dan semua ini telah diberkati oleh agama yang resmi. Dari sudut pandang Kupang, Jakarta, dan dunia luar, maka perdamaian telah dipulihkan dan persoalannya selesailah sudah.

Tetapi, dari sudut pandang politik lokal, upacara tersebut telah berhasil melukiskan peristiwa Kamis Berdarah sebagai perang antar-etnik yang misterius, tanpa sebab-sebab yang jelas, dan tak seorang pun bisa dimintai pertanggung-jawaban. Pada sore hari setelah upacara itu, Kepala Staf Korps TNI AU Wilayah II Ujung Pandang, Marsekal Pertama PLD Leo Watimena menyatakan kepada pers bahwa Malo dianggap sebagai salah satu "putra terbaik" AURI, dan ia tidak akan diberhentikan dari jabatannya.<sup>38</sup>

Penyelesaian persoalan seperti ini mewariskan banyak isu yang tak terpecahkan kepada elit politik di Sumba Barat. Di luar kelompok kecil loyalis Malo berkembang banyak ketidak-puasan dan alat yang paling bisa mereka gunakan untuk menyatakannya adalah partai Golkar. Dengan demikian Golkar menjadi partai oposisi dan terus menekan agar Malo dicopot dari jabatannya.

## Pencopotan yang Tak Pernah Terjadi

Ada orang-orang di Waikabubak yang memberi komentar bahwa jika Suharto masih berkuasa, Malo pasti akan dengan cepat diganti dengan perwira militer lain untuk melindungi reputasi militer sendiri. Namun, orang ragu bahwa Presiden Habibie juga bisa berbuat demikian. Mungkin kalangan militer akan memandang secara lain pencopotan seorang Bupati dari kalangan militer oleh seorang presiden dari kalangan sipil.<sup>39</sup>

Secara prosedur, dalam hal ini Gubernur dapat memberikan sarannya kepada Menteri Dalam Negeri, kedudukan yang sepanjang kekuasaan Orde Baru selalu diduduki oleh seorang militer. Karena berada dalam posisi sulit ini, Gubernur Piet Tallo selalu memberi jawaban yang tidak tegas ketika bertemu dengan pers dan ia hanya mengatakan bahwa prosedur yang tepat akan diambil. Ia sedikit lebih berterus terang kepada para pegawai senior dengan mengatakan salahlah jika membiarkan para demonstran mengira bahwa mereka bisa mencopot Bupati, karena sikap ini hanya akan mendorong mereka bersuara lebih keras dan lebih sering. Sikap Gubernur ini membuat banyak hal terkesan misterius, karena tak seorang pun tahu pasti apa yang diinginkan oleh Gubernur Tallo dan saran apa yang akan dia sampaikan kepada Menteri di Jakarta.

Gubernur Tallo sendiri tak pernah menjelaskan kepada umum alasan tindakannya yang berhati-hati itu. Tapi orang-orang yang skeptis menyatakan bahwa dia sendiri dalam keadaan lemah karena persoalan korupsi ujian penerimaan pegawai negeri itu, yaitu justru isu yang memicu demonstrasi menentang Malo dan mendorong terjadinya peristiwa Kamis Berdarah. Persoalan ini menyangkut seluruh NTT dan tanggung jawab

atas persoalan ini lebih banyak terletak pada pundak Gubernur daripada Bupati. Perbedaan tingkat kemampuan politiklah yang membedakan kedua orang ini, sehingga sementara Tallo berhasil meyakinkan orang bahwa ia akan mengambil tindakan untuk menyelesaikan persoalan, arogansi Rudolf Malo justru memacu musuh-musuhnya untuk beraksi, dan reaksinya yang berlebihan dan mementingkan diri sendiri telah menjerumuskannya ke dalam bencana.

Alasan praktis lain yang menyebabkan Malo tetap dibiarkan dalam jabatannya adalah bahwa, menurut jadwal yang telah ditentukan, masa jabatannya akan berakhir 18 bulan lagi. Menurut jadwal ia harus menyerahkan surat pengunduran dirinya secara tertulis pada bulan September 1999, dan akhirnya menyerahkan jabatan kepada penggantinya pada bulan April 2000. Pencopotan sebelum waktunya akan berarti bahwa pengganti sementara mungkin akan berasal dari kalangan militer, yang kemudian dapat ikut memperebutkan masa jabatan 5 tahun berikutnya, yang akan dimulai pada bulan April 2000.

Sementara itu, dengan cepat para pemuda sarjana, yang sebelumnya ikut dalam demonstrasi menentang korupsi dalam ujian pegawai negeri, mengajukan tuntutan pemberhentian Malo pada tanggal 7 November.<sup>40</sup> Dua minggu kemudian secara tak terduga sekelompok tetua dari Wewewa ikut bersuara seperti mereka. Pada tanggal 21 November, sekitar 31 tokoh terkemuka dari kedua wilayah Wewewa Timur dan Barat menanda-tangani sebuah deklarasi yang meminta Malo agar bersedia mundur sendiri, atau kalau tidak akan dimundurkan. Kelompok ini terdiri dari mantan anggota DPRD dan pejabat senior yang disegani, dan pertimbangan mereka biasanya sangat dihargai. Tampaknya mereka sebelumnya mungkin berharap dapat bergerak di belakang layar, karena baru empat minggu kemudian seruan mereka dikeluarkan di muka umum.<sup>41</sup> Isi surat mereka sebenarnya logis dan moderat, namun Malo meremehkan mereka sebagai kelompok “mantan-mantan”, seolah pandangan mereka tidak lagi relevan. Seruan mereka tampaknya tidak dianggap serius oleh kalangan di luar Sumba Barat.

Selang satu hari kemudian, pengumuman deklarasi 31 tokoh tersebut diikuti oleh surat dari para pemimpin partai Golkar yang mewakili 4 Komisaris Kecamatan Wewewa yang meminta agar para anggota Golkar di DPRD II mencabut dukungan mereka kepada Malo.<sup>42</sup> Keesokan harinya, pimpinan Golkar di DPRD II menindaklanjuti surat itu dengan mengatakan bahwa mereka berencana akan mengangkat persoalan tersebut ke dalam sidang dewan berikutnya. Tampaknya, momentum mulai bergulir.

Di depan pers, Gubernur Tallo masih memberikan tanggapannya secara berhati-hati, dengan secara seksama mengemukakan pandangan dari kedua pihak mengenai pencopotan Rudolf Malo.<sup>43</sup> Sebuah sinyal baru tampak ketika dalam pertemuan dengan para pemimpin masyarakat Sumba di Kupang pada akhir Desember, ia berkomentar bahwa seni mengail ikan adalah menarik ikan keluar dari kolam tanpa mengeruhkan airnya. Pada tanggal 7 Januari 1999, taktik mengail gaya Tallo tampaknya akan menuai keberhasilan ketika juru bicara pemerintah propinsi mengumumkan kepada pers bahwa Rudolf Malo telah mengindikasikan kesediaannya mundur dari jabatan, dan bahwa Panglima Kodam Udayana Adam Damiri di Bali telah memberikan lampu hijau dalam pertemuannya dengan Gubernur.<sup>44</sup> Namun, keterangan ini segera dibantah oleh sumber militer di Kupang.<sup>45</sup> Sejak saat itu jelas bahwa airnya masih keruh sekali dan akan muncul pertarungan

yang sengit antara Golkar dan militer. Gubernur Tallo secara berhati-hati menghindari terlibat lebih jauh dalam perkara ini.

Golkar tetap bersikeras dan tembakan salvo berikutnya sangatlah mengesankan. Tembakan Golkar itu muncul dalam bentuk petisi yang ditandatangani oleh 322 tokoh terkemuka dari seluruh Sumba Barat, yang menyerupai daftar nama seluruh pemimpin politik generasi sekarang, yang semuanya menuntut agar Malo diberhentikan dari jabatannya. Petisi itu diserahkan oleh mantan Bupati sebelumnya, Drs Umbu Djima, yang sekarang telah menjadi wakil Sumba Barat di DPR-RI. Umbu Djima kembali ke Waikabubak pada tanggal 12 Januari untuk menyerahkan petisi tersebut, pertama ke DPRD II, kemudian ke kantor pemerintahan untuk bertemu dengan Malo beserta seluruh anggota Muspida.<sup>46</sup> Malo menerima rombongan itu dengan gaya yang formal namun pasif, dan seperti biasa ia menyatakan bahwa persoalan itu akan diputuskan oleh yang berwenang.<sup>47</sup>

Golkar masih belum kehabisan sumber daya politiknya dan hal ini dibuktikan dengan hadirnya deklarasi dari 8 organisasi sosial yang juga mengulang tuntutan pengunduran diri Malo.<sup>48</sup>

## Pembelaan Rudolf Malo

Malo tidak terguncang oleh semua ini. Sesaat sebelum sidang DPRD II pada bulan April, ia membalas dengan petisi yang ditandatangani oleh 3413 warga Sumba Barat yang memintanya untuk tetap menjabat sebagai Bupati.<sup>49</sup> Mereka mendaftarkan semua prestasinya sebagai Bupati dan menyatakan bahwa tidak adil jika Bupati Malo harus mundur dari jabatannya, kecuali jika DPRD juga membubarkan diri pada saat yang bersamaan. Jumlah warga yang menandatangani petisi ini mungkin mengundang decak kagum para kolega Malo di dalam militer dan di luar Sumba Barat, namun di dalam Sumba Barat sendiri petisi itu bisa dipandang sebagai bukti betapa sedikitnya dukungan kalangan elit kepada Malo.

Meski Malo acapkali mampu menciptakan kesan mendamaikan di depan publik ketika ia mengungkapkan penyesalannya atas peristiwa yang telah terjadi atau meminta maaf atas kegagalannya mencegah tragedi 5 November, namun sikap sejuk itu menyembunyikan pandangan yang sangat frontal tentang apa yang telah terjadi. Dalam pembicaraan tertutup dia selalu siap mengklaim bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun dan secara berapi-api mengatakan "*Itu rekayasa semua!*"— bahwa semua itu adalah kesalahan lawan-lawan politiknya yang telah bersekongkol untuk menjatuhkannya.

Ia seringkali berbicara dari sudut pandang yang sangat subjektif, tanpa menyadari bagaimana pernyataannya tersebut akan diterima oleh orang lain. Pernyataannya bahwa ia sangat terharu mendengar begitu banyak orang Wewewa siap mengorbankan nyawa mereka untuk dirinya, guna membelanya karena penggunaan 'nama keras' yang bermaksud menghina, membuat orang menggelengkan kepala, terheran-heran bahwa ia dapat berkata-kata seperti itu.<sup>50</sup> Pernyataannya yang lain, bahwa peristiwa Kamis Berdarah setidaknya telah mengangkat Sumba Barat ke halaman muka surat kabar nasional, terkesan sangat tidak

berperasaan, sehingga muncul kritik di media yang disuarakan oleh salah seorang anggota kelompok “mantan-mantan”.<sup>51</sup>

Sidang DPRD II dimulai pada tanggal 15 Februari. Dalam sidang tersebut, mereka menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan beralih ke topik utama, yaitu usulan agar diadakan sidang istimewa di mana Bupati Malo akan dimintai pertanggung-jawaban dalam memerintah. Setelah sidang tersebut, anggota-anggota DPRD menerima delegasi dari 84 keluarga dari Loli yang menyampaikan keluhan bahwa Malo aktif memberi kompensasi pada keluarga korban yang tewas dari Wewewa, namun tidak memberi kompensasi pada mereka dari Loli yang kehilangan rumahnya.<sup>52</sup> DPRD juga menerima delegasi pemuda yang menyertakan petisi dari 80 pemuda untuk mendukung semua tuntutan sebelumnya mengenai pengunduran diri Bupati.<sup>53</sup>

Pada hari berikutnya, 5 anggota fraksi ABRI mengajukan pendapat mereka bahwa tanggung jawab Malo telah “diejawantahkan” dalam upacara perdamaian tanggal 23 Januari, sehingga persoalan itu seharusnya tidak lagi diungkit-ungkit oleh DPRD II, karena pengungkitan itu ibarat membuka luka lama yang telah diplester.<sup>54</sup> Sebagian anggota lainnya berpendapat bahwa DPRD tengah berusaha merampas kewenangan Mendagri.<sup>55</sup> DPRD terpecah dalam persoalan itu dan tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai, sehingga keputusan ditempuh melalui pengambilan suara. Pemungutan suara itu menghasilkan 15 suara dari F-KB (Golkar) mendukung usulan sidang istimewa tertutup yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Februari untuk mendengar laporan Malo, sedangkan 4 suara dari F-ABRI menolaknya. Namun, Malo tidak menghadiri sidang tanggal 18 Februari itu dan F-ABRI *walk-out*.<sup>56</sup> Sidang DPRD itu tidak menghasilkan keputusan apa-apa kecuali kesepakatan membentuk panitia kerja yang beranggotakan 6 orang untuk memformulasikan pandangannya.

Pandangan DPRD itu sebenarnya bisa dikirim ke Menteri Dalam Negeri, lewat perantara Gubernur, agar menjadi bahan pertimbangan beliau untuk memutuskan apakah akan memberhentikan atau mempertahankan Malo.<sup>57</sup> Tapi, pandangan DPRD ini tidak lagi terdengar di kalangan umum. Perjuangan Golkar untuk mencopot Rudolf Malo dari jabatannya terus berlanjut dari bulan November 1998 hingga April 1999, namun tanpa hasil. Begitu sajalah hasil usaha partai yang memenangkan 90% suara dalam pemilu 1997. Malo tetap *survive* dan akan menuntaskan masa jabatannya.

Sekarang agenda politik mendadak berubah karena Golkar mengalihkan perhatiannya pada pemilu yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999. Sekarang, lawan politiknya bukanlah Rudolf Malo, melainkan partai oposisi, PDI-P.

## Aktivis Lansia di PDI-P

PDI-P adalah partai yang lumrah dipilih oleh orang-orang yang mencari partai alternatif di luar partai pemerintah, Golkar, baik di Sumba Barat maupun di seluruh NTT. Dalam pemilu 1995, partai peraih



suara terbanyak di NTT adalah PNI-nya Soekarno, partai Katolik dan partai Protestan. Ketiga partai ini telah digabung ke dalam PDI ketika Soeharto menerapkan kontrol atas sistem kepartaian pada tahun 1972. Meski mengalami masa-masa suram, namun pada akhir kekuasaan Orde Baru, ketika PDI pimpinan Megawati meneguhkan dirinya sebagai salah satu pusat oposisi terkuat terhadap Soeharto, PDI-P mulai menarik banyak dukungan dari sebagian besar wilayah NTT.

PDI-P Sumba Barat dipimpin oleh Julius Lede Keremata, seorang yang keras dan ulet yang mampu bertahan terhadap mesin penggilas Golkar dalam berbagai ajang pemilu Orde Baru. Pada awalnya ia adalah anggota Parkindo<sup>58</sup> sebelum akhirnya bergabung menjadi anggota PDI sejak partai itu didirikan. Sejak ia pensiun dari menjadi pegawai negeri pada tahun 1984, ia mampu menghindar dari berbagai sanksi yang diterapkan kepada mereka yang dianggap tidak loyal kepada pemerintah. Ketika para pentolan lain dipaksa keluar dari PDI, Keremata tetap bertahan hingga menjadi tokoh oposisi terdepan.

Keremata berasal dari Wewewa dan ia telah menjalani karirnya di Waikabubak, selama bertahun-tahun menjadi Kepala SMP Kristen. Sekolah ini adalah SMP terbaik di kota itu, sehingga kebanyakan elit Waikabubak dari generasi yang lebih tua menitipkan anak-anak mereka dalam asuhannya, dan banyak dari generasi yang lebih muda pernah menjadi muridnya. Berawal dari perannya yang disegani ini, ia terus bertahan dari berbagai strategi Orde Baru yang mengintimidasi, merayu, merongrong atau menjelekkkan namanya, sehingga ia memperoleh reputasi integritas seperti yang dimiliki oleh Megawati. Dari tahun ke tahun, Keremata tak henti-hentinya melapor ke polisi atau ke Kejaksaan tiap kali ia memiliki bukti kecurangan Golkar yang mencegah suara para pendukung PDI dihitung dalam pemilu. Dulu, ketika semua orang tahu bahwa tak akan ada tindakan yang diambil berkaitan dengan keluhannya, banyak orang menertawakannya karena dianggap kuno dan ketinggalan jaman. Sekarang, menjelang usia 75 tahun, ia hidup lebih lama daripada Orde Baru, dan kesempatan baginya sudahlah tiba.

Orang-orang baru dalam PDI-P berasal dari berbagai latar belakang. Mereka adalah anak-anak muda yang bersuara vokal dengan latar belakang pendidikan di Jawa atau Bali. Dan sebagai sarjana, atau yang putus sekolah, mereka kembali ke Sumba membawa serta pengalaman politik yang lebih radikal. Selain itu, anggota-anggota baru PDI-P juga ada yang berasal dari kalangan tua. Pada umumnya mereka ini adalah para pegawai negeri yang telah dipaksa masuk ke KORPRI dan Golkar, kendati mereka memiliki pendapat yang lebih liberal. Sekarang mereka telah menjemput kesempatan untuk bebas dan mendukung partai yang lebih sesuai dengan keinginan mereka.

Ketika kampanye dimulai pada tanggal 20 Mei, Golkar melancarkan tema-tema yang biasa dia pakai dengan menyatakan bahwa partai ini bertekad untuk memenangkan 100% suara seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Sebaliknya, PDI-P menyatakan bahwa para calonnya ada di sana untuk melayani masyarakat.<sup>59</sup> Megawati datang ke Sumba pada tanggal 27 Mei dan diterima secara antusias, meski ia hanya mengunjungi Waingapu di Sumba Timur dan para pendukungnya dari Sumba Barat harus pergi ke sana untuk berjumpa dengannya.<sup>60</sup> Golkar sendiri mendatangkan sekutu dekat Habibi yang terkenal, A.A Baramuli, untuk berkampanye di Waikabubak.

Perkembangan serupa juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, dan di banyak daerah di NTT. Bagi sebagian besar pemilih, yang dicekoki dengan berbagai peristiwa yang mereka lihat di televisi setiap malam, isu yang diminatinya bersifat nasional dan bukannya isu daerah.

## Pemberontakan di Kotak Suara

Pemilu diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999 dan di Sumba Barat kemenangan besar diperoleh oleh PDI-P, karena ia mengantongi 68.000 suara (46%), dibandingkan dengan Golkar yang meraih 42.000 suara atau 28%. Hasil ini menjadikan PDI-P sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPRD II, yaitu 15 kursi dari total 35 kursi.

<b>Pemilihan DPRD-II Sumba Barat periode 1999-2004</b>		
<b>Analisis menurut partai jumlah suara partai-partai</b>		
<b>Fraksi</b>	<b>Suara</b>	<b>Kursi</b>
PDIPerjuangan	<b>68,776</b>	<b>15</b>
Golkar	<b>42,142</b>	<b>9</b>
PDKB	<b>17,084</b>	<b>3</b>
PDI Budihartono	<b>3,592</b>	<b>1</b>
PPP	<b>1,590</b>	<b>1</b>
Partai Marhaen	<b>4,013</b>	<b>1</b>
Partai Republik	<b>1,865</b>	<b>1</b>
ABRI	<b>0</b>	<b>4</b>
Jumlah di DPRD-II	<b>149,610</b>	<b>35</b>

Hasil ini merupakan kemenangan simbolik yang besar bagi PDI-P, namun PDI-P tidak memiliki kursi mayoritas sehingga belum bisa dipastikan apakah partai ini akan mampu mengontrol hasil perolehan suara. Satu-satunya partai lain di luar PDI-P dan Golkar yang berhasil memperoleh suara dalam jumlah yang signifikan adalah PDKB (Partai Demokrasi Kasih Bangsa), yang tidak begitu penting di pentas nasional, tetapi ketua umumnya adalah seorang kelahiran Wewewa namun bertempat tinggal di Jakarta, Prof. Manasse Malo.<sup>61</sup> Keberhasilan PDKB ini hanya menonjol di kecamatan Wewewa Barat, dan di tempat-tempat lain suara yang diperolehnya kurang dari 10%.

Secara umum hasil pemilu di Kabupaten Sumba Barat cocok dengan pola hasil pemilu di seluruh propinsi NTT. Di NTT secara keseluruhan, sebagian besar suara terbagi antara Golkar dan PDI-P, dan hanya sedikit suara yang direbut oleh partai-partai lain. Kedua partai itu hampir berbagi suara sama rata di tingkat Propinsi, tetapi Golkar menang dengan selisih yang tipis. Hasil pemilu per kabupaten di seluruh propinsi NTT

menunjukkan pola yang menarik. Golkar berhasil menduduki mayoritas kursi di semua kabupaten di Pulau Timor dan di Sumba Timur, sementara PDI-P menang di semua kabupaten di pulau Flores dan di Sumba Barat. Pembagian ini bisa ditafsirkan bahwa masyarakat Timor yang lapisan-lapisan kelasnya lebih nyata memilih bertahan dengan Golkar, dan masyarakat Flores yang lebih egaliter memberikan suara kepada perubahan, dan perbedaan Sumba Timur dengan Sumba Barat sejalan dengan pola ini. Tetapi jelaslah ada faktor-faktor lain juga. PDI-P di Flores didukung oleh tokoh nasional Frans Seda, yang pernah menjabat posisi menteri dalam kabinet Soeharto, dan dukungan ini dianggap penting dalam melegitimasi adanya perubahan. Di Timor, Kotamadya yang menjadi ibukota propinsi dan kabupaten Kupang di sebelahnya sama-sama bukan daerah pedalaman yang terstratifikasi berdasarkan kelas, sehingga harus dicari penjelasan lain untuk kedua kasus ini.

Lewat analisa pola suara di seluruh Kabupaten Sumba Barat, muncul semacam bukti yang menegaskan bahwa peristiwa Kamis Berdarah mungkin berdampak pada para pemilih. Dua kecamatan terkecil di Sumba Barat adalah kota Waikabubak sendiri dan kecamatan Loli yang mengelilingi kota. Hanya di kedua kecamatan inilah Golkar memenangkan mayoritas suara. Hal ini mungkin disebabkan oleh terkonsentrasinya para pegawai negeri di kota Waikabubak yang mengikuti pola kota-kota lainnya di NTT yang cenderung memilih Golkar. Kecamatan Loli juga memiliki beberapa wilayah yang banyak dihuni oleh pegawai negeri, namun loyalitas kepada Ketua DPRD II, Lero Ora, pasti juga merupakan faktor yang penting.

<b>Pemilihan DPRD-II Sumba Barat periode 1999-2004</b>			
<b>Analisis menurut Kecamatan, persentase suara yang dimenangkan oleh partai- partai bear</b>			
Kecamatan	Golkar %	PDIP %	PDKB %
Kota	46.4	33.9	
Loli	55.5	31.7	
Wewewa Timur	21.0	62.9	
Wewewa Barat	12.1	44.1	31.2
Laratama	29.0	54.0	
Kodi	30.8	32.5	
Walakaka	26.7	53.4	
Katikutana	31.5	47.0	
Sumba Barat	28.2%	46.0%	10%

Sebaliknya, Wewewa banyak memberikan suara pada PDI-P. Golkar hanya memenangkan 20% suara di Wewewa Timur, dan jumlah suara yang diperolehnya turun menjadi 12% di Wewewa Barat, yang merupakan kampung halaman Prof. Manasse Malo. Tak satu pun dari partai-partai ini yang secara aktif mendukung Rudolf Malo, tapi kita bisa menduga bahwa PDI-P mungkin memberi tempat bagi sebagian orang yang merasa tidak bisa memilih partai Golkar yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lero Ora.

Kendati ada banyak faktor yang jelas-jelas membentuk pola pemberian suara, namun ada satu tema dominan yang bisa diidentifikasi di semua tingkat, nasional, regional, dan lokal, yaitu kehendak untuk membuat perubahan dan pemberian suara menentang status quo. Hampir semua narasumber melihat pemilu dari sudut pengertian ini, di pihak manapun mereka berada. Media secara intensif meliput opini elit, namun kami tidak menemukan satu pun survei tentang alasan penduduk desa dalam memberikan suara mereka.

Meski demikian, di wilayah Wanokaka yang berada di pantai selatan Sumba Barat, kami menemukan pola sederhana dalam pemberian suara.<sup>62</sup> Para pemilih memberikan alasan yang sangat bersifat setempat dalam memberikan suara mereka, namun mereka juga memandang diri mereka sendiri sebagai bagian dari gerakan perubahan yang berskala nasional, yang diberi nama 'reformasi'. Bagi para narasumber kami, pemilu kali ini adalah pemberontakan terhadap penguasa politik. Slogannya adalah 'reformasi', tetapi pada hakikatnya para penduduk memberikan suara melawan arogansi dan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat lokal. Para pemilih di pedesaan umumnya sedikit mengenal aktor-aktor politik di tingkat Kabupaten dan Nasional, tetapi hanya sebagian kecil yang mempunyai pendapat jelas mengenai Megawati dan Akbar Tandjung di tingkat nasional, atau jago mereka di tingkat kabupaten. Sebaliknya mereka sangat mengenal Kepala Desa dan Camat mereka, dan mereka mempunyai pendapat jelas, baik pro maupun kontra, mengenai orang-orang tersebut. Bagi mayoritas penduduk, Golkar sama artinya dengan korupsi dan penyalah-gunaan kekuasaan, dan itulah yang mereka tentang dalam memberikan suaranya.

Salah satu pertanyaan yang lebih menarik untuk diajukan tentang pemberian suara di NTT adalah: seberapa banyak suara Golkar mampu dipertahankan lewat keberhasilan penggunaan taktik tradisional Golkar mengintimidasi lawan politiknya dan membeli loyalitas para pemimpin masyarakat? Di beberapa tempat seperti di kabupaten-kabupaten di pulau Timor, taktik seperti ini mungkin berperan penting. Namun di Kabupaten Sumba Barat taktik ini tampaknya tidak memberikan dampak yang berarti. Setidaknya dalam sampel kecil di Wanokaka, mereka yang tetap setia kepada Golkar adalah para pemilih yang bersikap independen, yang dengan lancar bisa menjelaskan bahwa mereka tetap memilih Golkar karena prestasi keberhasilan Golkar dalam program pembangunan. Banyak orang menerima kekalahan Golkar dengan lapang dada, dan tetap berharap bisa lebih baik lagi pada pemilu berikutnya dalam kerangka budaya politik reformasi yang baru.

## DPRD yang Baru

Kemenangan PDI-P memunculkan peta politik yang baru di Sumba Barat. Perebutan kekuasaan sekarang terjadi antara Golkar dan PDI-P. Meski menelan kekalahan pemilu yang baru pertama kalinya terjadi, namun organisasi partai Golkar mampu bertahan. Bupati Malo masih memegang kekuasaan eksekutif, tetapi dia tidak memiliki basis dukungan di antara anggota-anggota DPRD yang baru terpilih, yang sekarang memiliki kekuasaan yang lebih besar bila dibandingkan dengan DPRD sebelumnya. Malo telah berhasil menyisihkan DPRD II sebelumnya, tetapi menjelang bulan April 2000, ketika DPRD memilih Bupati baru untuk masa jabatan 2000-2005, Malo sendiri tampak semakin tersisih.

Keremata terpilih sebagai Ketua DPRD II pada tanggal 4 Oktober 1999, dan Drs. Hugo R. Kalembe (Golkar) terpilih secara aklamasi sebagai Wakil Ketua I dan Kapt (Inf) H. Simarmata (Fraksi TNI/Polri) terpilih sebagai Wakil Ketua II.

Setelah susunan DPRD menjadi jelas maka seleksi untuk pemilihan Bupati menjadi titik perhatian politik utama. Ini dikenal sebagai Bursa Bacabup (Bakal Calon Bupati), yang merupakan proses yang panjang dan kompleks, yang diumpamakan dengan pasar saham atau parade busana.

Kriteria memilih calon disusun dan didiskusikan di DPRD. Para calon harus reformis, kompeten, keseimbangan etnik, dan bersih. Keseimbangan etnik merupakan isu sentral. Selama ini, penting bagi seorang kandidat di Sumba Barat untuk menjamin dukungan dari sebanyak mungkin kecamatan dengan menciptakan jaringan aliansi. Namun sekarang pengisian posisi Wakil Bupati merupakan proses publik yang akan diliput oleh media.

Publik pembaca surat kabar dan berbagai macam organisasi masyarakat ikut serta dalam proses ini dengan penuh semangat dan daftar berisi 30 sampai 40 nama diterbitkan di Pos Kupang. Beberapa orang calon bekerja di jajaran pemerintahan di Waikabubak, tetapi sebagian besar calon menempati kedudukan senior dalam pemerintahan di Kupang, di tempat-tempat lain di NTT, dan bahkan di Pulau Jawa.

Besarnya jumlah calon itu sebagian disebabkan oleh kesetiaan etnik dan setiap kelompok sub-etnik di Sumba Barat diwakili oleh satu atau dua orang favorit. Setelah peristiwa Kamis Berdarah keseimbangan etnik lebih penting lagi daripada biasa. Pemilihan Wakil Bupati secara bersamaan sebagai mitra junior Bupati memberikan kesempatan untuk mencapai keseimbangan ini.

PDI-P kemudian melakukan gebrakan mengejutkan dengan merebut bekas calon Golkar dalam pemilihan tahun 1997, Thimotius Langgar S.H. Sebuah delegasi terbang ke Kupang untuk bernegosiasi dengan Langgar. Karena ia dari Wewewa, ia dipasangkan dengan Wakil dari Loli. Beberapa calon dipertimbangkan, tetapi delegasi itu memilih seorang akademisi, Drs. Julianus Poteleba M.Si., Kepala Jurusan Administrasi Negara di Universitas Nusa Cendana di Kupang.

Pengurus Golkar Sumba Barat merasa bahwa tidak *fair* bahwa calon mereka, yang mereka ajukan dalam tahun 1997, sekarang digunakan untuk menentang mereka. Namun kesetiaan kepada Golkar sudah sangat melemah dan banyak tokoh-tokoh Golkar mengangguk-anggukkan kepala setuju. Karena Langgar telah secara cermat dipilih sebagai calon mereka pada tahun 1995, ia jelas calon yang cakap sekarang.

Direkrutnya bekas kandidat Golkar, Thimotius Langgar, juga menarik perhatian pengurus pusat PDI-P, yang menolaknya dengan alasan bahwa posisi itu seharusnya diserahkan kepada seseorang yang loyal kepada PDI-P, yaitu seseorang yang mereka kenal dan seseorang yang pantas menerima balasan atas dukungan

yang diberikannya pada PDI-P. Kali ini Pak Keremata sendirilah yang harus terbang ke Jakarta untuk meyakinkan partainya bahwa pilihan yang dibuat ini adalah pilihan yang bijaksana.<sup>63</sup>

Berisiknya suara yang mengajukan calon masing-masing sekarang diganti dengan usaha serius untuk memperoleh janji suara. Menjadi jelas bahwa Rudolf Malo belum melepaskan harapannya dipilih lagi untuk masa kerja kedua. Setelah ia berhasil memanipulasi anggota-anggota DPRD pada tahun 1995 dan 1999, ia mulai bersiap-siap mengulanginya lagi. Dalam sidang DPRD-II yang dimulai pada 2 Maret Malo dengan gigih membela prestasi kerjanya dalam jabatannya selama lima tahun itu. Ia meletakkan kematian dan kerusakan yang terjadi pada Kamis Berdarah pada pundak para demonstran reformasi, dan memusatkan perhatian pada membeberkan prestasi-prestasinya dalam membangun ekonomi. Pidatonya mengesankan, terdiri dari 147 halaman dan 320 lampiran, tetapi anggota-anggota DPRD tidak tertarik pada segala detil ini. Mereka menolak laporan itu pada tanggal 17 Maret dengan suara 19 berbanding 9.

Malo sekarang dianggap telah tersingkir dari kancah pertarungan. Daftar calon-calon yang patut diperhitungkan sekarang berkurang menjadi tujuh paket. Setiap calon Bupati dipasangkan dengan calon Wakil Bupati dari kelompok sub-etnik lain (lihat tabel).

### *Money Politics* dan Sengketa Politik

Pemilihan Bupati baru oleh DPRD II direncanakan berlangsung pada tanggal 7 April 2000, sehingga Bupati terpilih diharapkan bisa mengucapkan sumpah jabatan dua minggu kemudian. Pada bulan-bulan awal setelah keanggotaan DPRD II ditetapkan, muncul dugaan bahwa PDI-P akan menemui kesulitan untuk menggolkan calonnya sebagai Bupati.

Terpilihnya Keremata sebagai ketua DPRD II cukup membesarkan hati, namun hal itu sebenarnya bukan merupakan pertanda calon PDI-P akan terpilih untuk jabatan Bupati. Ketua DPRD II adalah posisi yang prestisius, namun itu bukan kedudukan yang 'basah'. Sebaliknya, siapapun yang terpilih sebagai Bupati akan memiliki kesempatan untuk menerima uang dalam jumlah besar dari izin kontrak yang dikeluarkannya. Dan duit yang dibelanjakan untuk memenangkan pemilihan Bupati itu bisa dianggap sebagai investasi yang berguna. Karena beberapa anggota Golkar dipandang memiliki dana dalam jumlah besar untuk tujuan memperoleh suara, muncul banyak keraguan tentang peluang keberhasilan PDI-P.

Ketika nama-nama calon diumumkan dan tanggal pemilihan kian mendekat, satu skenario terlihat mengemuka. Keempat suara dari TNI tidak diarahkan kepada partai manapun, dan dua partai kecil tidak memiliki jago yang ikut bersaing. Sehingga dengan menggaet 6 suara ini calon dari Golkar yang memiliki 9 suara itu akan bisa menyamai PDI-P dengan jumlah suara 15. PDI-P dianggap sangat rentan jika satu atau dua orang anggotanya melakukan pembelotan.

Ketika sidang DPRD dimulai pada bulan April, ada 7 paket calon. Tujuh hari dialokasikan kepada para calon untuk memaparkan program dan tujuan yang akan dia wujudkan selama menjabat sebagai bupati. Masing-masing paket calon berisi seorang kandidat Bupati yang dipasangkan dengan seorang Wakil Bupati dari kecamatan lain. Dengan cara ini, masing-masing paket calon membuat klaim yang eksplisit bahwa mereka mampu berdiri di atas loyalitas etnik yang sempit. Kemampuan untuk menyembuhkan luka akibat konflik etnik juga dipandang penting dalam peran sebagai bupati ini. Namun, yang menjadi keprihatinan banyak orang bukanlah bahwa loyalitas etnik akan banyak berpengaruh di gedung DPRD II. Uanglah yang menjadi faktor yang dipikirkan semua orang.

Pada pagi harinya, para anggota PDI-P berangkat bersama-sama ke gedung DPRD untuk mengikuti sidang pemilihan yang penting ini. Namun mereka melihat jalan masuk ke gedung itu diblokade oleh 50 orang demonstran dari Wewewa, semuanya menyisipkan parang di sabuk mereka. Meski Dandim Mulyadi dan Wakapolres Isaak Daris hadir dalam sidang itu, dengan penjagaan polisi termasuk tambahan pasukan dari Kupang, namun mereka tidak mengambil tindakan untuk turun tangan. Para demonstran meneriakan bahwa mereka akan memulai sengketa politik. Mereka tidak akan membiarkan proses pemilihan berjalan karena prosedur DPRD tidak *fair* dan calon mereka, Bupati Malo, tidak terdaftar sebagai salah seorang calon.

Para anggota DPRD II sangat tidak siap menghadapi perkembangan ini. Sukar dipercaya jika Malo bersedia mensponsori intimidasi bersenjata untuk kesekian kalinya, walaupun secara terselubung. Dan kali ini Kapolres Simatupang tidak ada di tempat untuk melucuti mereka. Namun Dandim Mulyadi dan polisi jelas-jelas tidak mengambil tindakan untuk mencegah penggagalan sidang. Segera diketahui bahwa orang-orang Wewewa yang bersenjata itu sudah tiba di Waikabubak malam sebelumnya dengan tujuan menghadiri sidang keesokan harinya, dan Dandim Mulyadi menyediakan makanan dan penginapan sepanjang malam itu. Selama setengah jam, demonstrasi bersenjata itu terlihat mendapatkan restu dari aparat keamanan, dan pemilihan tampaknya harus ditunda.

Kebuntuan ini dipecahkan oleh Wakapolres Isaak Daris yang, tanpa tampak berkonsultasi dengan orang lain, tiba-tiba mengambil alih kendali atas situasi dan bergerak cepat dengan kelompok polisi Brimob dari Kupang. Dengan tegas ia memerintahkan para demonstran untuk keluar dari gedung itu dan secara tangkas ia menegakkan perintahnya. Bagi anggota-anggota DPRD II yang terheran-heran dengan intervensi ini, tindakan Isaak Daris ini kelihatan seperti pemberontakan kepada atasan karena Dandim Mulyadi terlihat terperanjat. Namun tidak ada waktu untuk memecahkan misteri ini. Para anggota DPRD kemudian masuk ke dalam gedung dan segera melanjutkan acara pemilihan.<sup>64</sup>

Pemilihan segera dilangsungkan dan anggota PDI-P tetap bertahan bersama. Calon mereka, Langgar dan Poteleba, terpilih dengan mengantongi 15 suara, tampaknya oleh solidaritas dari fraksi mereka sendiri. Calon Golkar yang paling berhasil hanya memperoleh 10 suara dan sisa 10 suara tersebar ke calon-calon lainnya. Anggota-anggota Golkar tidak mampu mempertahankan solidaritas mereka dalam pemilihan ini, mereka telah terpecah-pecah karena masing-masing mengejar kepentingannya sendiri-sendiri.

Kekalahan “*money politics*” ini lebih gampang dipahami dibandingkan blokade gedung DPRD yang mengherankan itu. Tidak masuk akal kalau sabotase terhadap sidang DPRD itu merupakan usaha serius dari Bupati Malo atau para pendukungnya karena sangat kecil kemungkinan mereka akan berhasil menunda pemindahan kekuasaan. Apakah para pendukung Malo itu secara diam-diam diorganisir oleh Malo, ataukah oleh provokator lainnya? Apakah Malo dan Mulyadi tidak lagi berpijak pada realitas, ataukah mereka mencoba saja untuk terakhir kalinya dalam situasi di mana walaupun kalah, tidak akan banyak ruginya? Apakah dengan pembubaran blokade itu berarti polisi telah memutus solidaritas dengan Bupati, ataukah hal itu menunjukkan perpecahan dalam kepolisian dengan tindakan Daris yang kelahiran Kupang itu, yang menempatkan loyalitas kepada Gubernur dan propinsi di atas kepentingan militer yang berpusat di Jakarta itu?

Dari sudut pandang masyarakat awam di Sumba Barat, tidak begitu menjadi persoalan apakah Kapolres dan Dandim bersatu atau berseteru, sengaja berkomplot, ragu-ragu, atau hanya kebingungan. Masyarakat awam merasa lega dengan adanya seseorang yang mempertahankan hukum dan ketertiban, dan menyudahi pertikaian politik yang sudah berlarut-larut itu.

Sementara Bupati Thimotius Langgar dan wakilnya Julianus Poteleba terpilih dengan ambisi besar untuk mempraktekkan administrasi yang bergaya baru, tidak begitu jelas apakah mereka akan berhasil atau tidak. Mereka mulai menduduki jabatan itu dengan kesadaran bahwa akan ditemui banyak kesulitan dalam mempertahankan hukum dan ketertiban, dan sangat tidak jelas bagaimana nanti peran polisi dan tentara, apakah akan membantu atau justru merintanginya.<sup>65</sup>

Pengangkatan Langgar dan Poteleba sebagai pemegang pemerintahan baru akan dilakukan dua minggu lagi, dan rejim lama masih punya kartu untuk dimainkan.

Suatu malam terjadi kebakaran di bagian keuangan kantor pemerintah kabupaten. Tak ada bagian lain yang ikut terbakar, namun semua catatan pembelanjaan uang selama tahun-tahun sebelumnya hangus. Penyebar gosip yang merebak di Waikabubak segera bersepakat tentang siapa yang menjadi dalang kebakaran itu, dan juga berasumsi bahwa pejabat polisi senior telah disuap. Seperti biasa, polisi gagal membekuk pelakunya dan kejahatan itu tetap tidak terungkap.

Hal yang berdampak lebih serius pada ekonomi Kabupaten itu adalah merebaknya pencurian ternak yang diyakini meningkat karena dilindungi seorang pejabat polisi senior. Selama beberapa bulan, pencurian itu beroperasi pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang terjadi bukan pencurian biasa di mana beberapa kerbau atau sapi Ongole (sapi putih) dihalau, namun sekawan ternak yang terdiri dari 20-30 ekor yang dicuri dan setelah sehari atau lebih dinaikkan ke atas perahu di pantai utara untuk dikapalkan ke Bima. Jika ada bahaya tertangkap tangan dalam operasi pencurian ini, ternak curian itu langsung dipotong di tempat dan selanjutnya dijual di pasar gelap di Waikabubak dan kota-kota kecil lain. Hal ini merupakan masalah yang sangat serius, karena yang dipotong bukan hanya ternak surplus tetapi juga ternak pembiak yang akan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menggantinya. Ketika Langgar dan Poteleba terpilih, pencurian ternak meningkat mencapai puncaknya sebelum kedua orang itu mempunyai kesempatan untuk



menghentikannya, dan di Waikabubak sendiri ada begitu banyak daging yang dijual murah di pasar gelap, hingga pejalan hewan, di mana hewan dipotong di bawah pengawasan, terhenti. Tampaknya para pencuri ternak dan pelindung mereka berniat mengambil keuntungan sebanyak mungkin selagi mereka masih memiliki kesempatan.<sup>66</sup>

Dengan demikian, tim baru itu mengambil alih kontrol atas pemerintahan dalam situasi krisis, namun dengan harapan besar untuk memulai sesuatu yang baru. Setelah 30 tahun sistem politik dikuasai oleh bekas Presiden Soeharto, Sumba Barat telah berhasil menyelenggarakan pemilu bebas yang memungkinkan pemilih menggulingkan partai yang berkuasa. Kedua pihak yang bertikai dalam tragedi Kamis Berdarah telah tersingkir dan tim Langgar-Poteleba telah menang tanpa dukungan dari militer maupun fraksi Golkar. Langgar dan Poteleba sama-sama pulang ke daerah asal setelah berkarir di ibukota propinsi, Kupang. Keduanya membawa harapan bahwa politik Orde Baru yang korup telah berakhir dan politik reformasi yang baru akhirnya bisa dimulai di Sumba Barat.

Pemilihan itu merupakan kemenangan besar fraksi reformasi atas status quo, dan juga kemenangan politik partai yang baru atas politik uang (*money politics*) dan manipulasi pemilihan yang dikendalikan dari pusat. Apakah perubahan ini berlangsung lama atautkah hanya sementara, hanya akan terjawab seiring dengan waktu.

<i>Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2000-2005</i> <i>Pemberian suara rahasia 7 April 2000</i>				
<i>Fraksi</i>	<i>Paket Cabup/Cawabup</i>	<i>Suku</i>	<i>Kursi</i>	<i>Suara</i>
<b>PDIPerjuangan</b>	Thimotius Langgar SH Drs Julianus Poteleba M.Si.	Wewewa Barat Loli	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Golkar 1</b>	Umbu S. Pateduk Dr Markus Righuta	Anakalang Kodi	<b>9</b>	<b>10 *</b>
<b>Golkar 2</b>	T. Lero Ora SH Hugo Rehi Kalembo	Loli Kodi		<b>2</b>
<b>Golkar 3</b>	Umbu K. Anagoga Hugo Rehi Kalembo	Anakalang Kodi		<b>6</b>
<b>PDKB</b>	Dr. Nico Woly Umbu Remu Samapaty	Kodi/Sabu Anakalang	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>PDI Budihartono</b>	Prof. Dr Agus Mone Robert Gana	Kodi Loli	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>PPP</b>	Umbu Giku Robert Gana	Umbu Ratu Nggai Loli	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Partai Marhaen</b>	Tidak ada		<b>1</b>	
<b>Partai Republik</b>	Tidak ada		<b>1</b>	
<b>TNI</b>	Tidak ada		<b>4</b>	
<b>Jumlah Suara</b>				<b>35</b>

\*Termasuk 4 suara TNI

## Endnotes

- 
- <sup>1</sup> Garis besar perjalanan karirnya dan riwayat hidupnya dilaporkan dalam *Pos Kupang*, 26 Juli 1998
- <sup>2</sup> Gubernur Tallo menggantikan Mayjen TNI (Purn) Herman Musakabe yang telah menjabat sebagai Gubernur dari tahun 1993-1998.
- <sup>3</sup> Tetapi, ketika upacara pelantikannya yang dijadwalkan pada tanggal 1 Juni diundur ke tanggal 15 Juni, muncul berbagai pemberitaan di pers Kupang bahwa penundaan itu disebabkan oleh korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Namun pemberitaan ini tidak disertai perincian atau bukti-bukti.
- <sup>4</sup> Dalam sebuah kasus yang diceritakan kepada kami oleh almarhum John Hawu Panna, seorang jurnalis yang berani dari majalah 'Fakta', Panna menemukan banyak laporan rinci yang bisa dipublikasikan tentang praktik korupsi yang lazim dilakukan dalam ujian pemilihan pegawai negeri baru. Pemeriksaan kertas ujian dilakukan dengan integritas tinggi, karena calon hanya diidentifikasi dengan nomor peserta. Tetapi terbuka kemungkinan korupsi, baik melalui praktik "joki", di mana seorang pengganti duduk mengerjakan soal ujian, atau melalui praktik "salah ketik" di mana dalam dokumen yang ditandatangani oleh Gubernur yang mengumumkan nama-nama peserta yang akan diangkat itu, di sebelah nomor yang lulus nama orangnya diganti dengan nama lain. Ketika Panna mengontak Tallo, pejabat yang waktu itu menjadi Wakil Gubernur itu berhasil turun tangan menangani kasus seorang calon yang memberi laporan kepada Panna. Tetapi sebagian besar penggantian yang korup itu tetap dibiarkan berjalan.
- <sup>5</sup> Lihat pemberitaan tentang Tallo di *Pos Kupang*, tanggal 9, 13, 14, 15, 16, 26 Juli 1998, dan *Dian* 24 Juli 1998.
- <sup>6</sup> Wawancara dengan saksi mata MK, Waikabubak, Maret 1999.
- <sup>7</sup> *Suara Karya*, 7 Juli 1998, *Pos Kupang*, 7 Juli 1998.
- <sup>8</sup> Wawancara dengan Cypri M Leyn SVD, Maret 1999.
- <sup>9</sup> Pernyataan 31 tokoh terkemuka Wewewa itu menuduh Malo melangkahi Gubernur (*Pos Kupang*, 23 Desember 1998, 'Bupati Malo Didesak Mundur').
- <sup>10</sup> Syarwan Hamid, mantan Jendral, sehingga ada pernyataan yang tersirat bahwa perspektif militer mungkin akan menentukan persoalan pencopotan itu.
- <sup>11</sup> Insiden Kupang ini sama sekali tidak masuk akal dari sudut politik Kupang atau hubungan masyarakat Kupang. Di NTT banyak yang berpendapat bahwa provokator yang memiliki koneksi dengan keluarga Soeharto dan militer telah mengorganisir kekerasan anti-muslim di Kupang tersebut, untuk membantu memobilisasi kekuatan-kekuatan Islam di Jakarta. Penjelasan ini masih bersifat dugaan, karena tidak ada bukti yang bisa diperoleh secara terbuka yang dapat menjelaskan masalah ini.
- <sup>12</sup> Ada proses pengadilan terhadap aktor-aktor kecil, sementara sponsor- sponsor di belakang layar dilindungi dari proses hukum (lihat bawah).
- <sup>13</sup> Insiden Ende, yang dinamai *Minggu Kelabu*, melibatkan serangan terhadap toko-toko orang Tionghoa di kota Ende oleh warga muslim. Insiden ini terjadi pada tanggal 8 Februari 1998 selama masa tugas Gubernur Herman Musakabe. Bukan tempatnya di sini mendiskusikan hal ini berdasarkan bukti-bukti yang ada, namun ada dugaan banyak orang bahwa insiden tersebut disebabkan oleh konflik intra-elit, yang diorganisir oleh Sekwilda dengan dukungan Dandim, untuk mendiskreditkan Bupati yang sedang menjabat.
- <sup>14</sup> Dalam makalah ini kami mencoba mengatasi kelangkaan bukti dengan melandaskan analisis pada sumber-sumber yang luas, dan dengan menunjukkan secara jelas jika ada kekurangan bukti.

- <sup>15</sup> Perkawinan antar-wilayah dalam masyarakat Sumba tradisional didiskusikan dalam Istutiah Gunawan, RSPAS, ANU, Canberra (2000), 'Hierarchy and Balance: A Study of Wanokaka Social Organisation'.
- <sup>16</sup> Pos Kupang, 15 November 1998, 'Orang Sumba asal dari nenek moyang yang sama'.
- <sup>17</sup> Misalnya Pos Kupang, 15 Januari 1999, 'IKAS Kupang mendukung perdamaian—hitung untung rugi berhentikan Malo' <ady>.
- <sup>18</sup> Anggota tim Muspida yang lain, yang terdiri dari Jaksa dan Danres sebenarnya berhasil lebih baik, duduk bersama dan berembung dengan para pemimpin tradisional di Loli, namun tugas mereka memang lebih mudah.
- <sup>19</sup> Ini adalah kata-kata yang diperhalus dari ungkapan yang kasar yang dikutip oleh saksi mata JA, Kampung Elopada, Wewewa Timur, Maret 1999. Versi yang sudah diperhalus tentang peristiwa-peristiwa ini dimunculkan dalam Pos Kupang, 15 November 1998, 'Kronologi Tragedi – Waijewa: Tidak Bermaksud Perang'.
- <sup>20</sup> Seorang komentator yang berasal dari Sumba Barat, Dr. A.A. Yewangoe, juga berpendapat bahwa hilangnya pengaruh para pemimpin tradisional adalah sebab penting yang mendorong terjadinya *Kamis Berdarah*, dalam Pos Kupang 8 November 2001, 'Dibutuhkan Tokoh Pemersatu'.
- <sup>21</sup> Misalnya pada fokus kepala berita mengenai desas-desus yang keliru bahwa Keba Moto telah terbunuh, dan bukannya pada kebenaran desas-desus bahwa ia diserang oleh orang-orang bertopeng.
- <sup>22</sup> Berbagai wawancara di Loli, termasuk Rauta Kariam Ama Magi di Paletelolu, W. Lele di Gollulowa.
- <sup>23</sup> Berbagai wawancara, termasuk dengan S.W. Kalegotana, Ir. D. Todu, Drs. J. Weru, Ch. Turu, G. Manyela.
- <sup>24</sup> Wawancara dengan Gerardus Manyela, reporter staf Pos Kupang (yang diidentifikasi dengan nama singkatan <gem>).
- <sup>25</sup> Wawancara dengan Gerardus Manyela dan Thomas K.
- <sup>26</sup> Pos Kupang, 1 Desember 1998, 'Korban Kamis Berdarah Terima Rp 52 juta'; dan lihat juga Pos Kupang 13 November 1998, 'Bupati Malo Menangis'.
- <sup>27</sup> Pos Kupang 10 November 1998, '11 Tersangka Diamankan'.
- <sup>28</sup> Pos Kupang 9 November 1998, 'Kamis Berdarah Diduga Ada Muatan Politis'.
- <sup>29</sup> Bantuan dari World Vision International dan LSM-LSM lainnya disalurkan melalui pemerintah.
- <sup>30</sup> Para pemimpin agama dari masyarakat Protestan (GKS dan Bethel), Katolik, Islam dan animisme (Marapu) berkumpul untuk memberikan tanggapan bersama. Lihat Dian 13 November 1998, 'Pernyataan Sikap Tokoh Agama terhadap Peristiwa Berdarah Waikabubak', yang memuat daftar para penanda-tangan dan isi pernyataan tersebut secara rinci <abw>.
- <sup>31</sup> Wawancara dengan Chris Turu, Maret 1999
- <sup>32</sup> Wawancara dengan Julianus Poteleba, November 2001
- <sup>33</sup> Dian 13 November 1998, 'Pernyataan Sikap Tokoh Agama ...' <abw>.
- <sup>34</sup> Lihat Moses Beding CSsR, 'Damai-Shalom Pasca Kamis Berdarah', PJ 15 Januari 1999, juga wawancara dengan Cypri M. Leyn, Maret 1999.
- <sup>35</sup> Wawancara dengan Cypri M. Leyn, Maret 1999.
- <sup>36</sup> Suara Pembangunan 27 Januari 1999, 'Berkorban Untuk Menghapus Perseteruan'. Kompas, 25 Januari 1999, 'Warga Sumba Barat Gelar Perdamaian Adat'. Dian 5 Februari 1999, 'Perdamaian yang Bersimbah Darah' <avi/abw>. Pos Kupang 24 Januari 1999, 'Waikabubak Kembali Banjir Darah' <ery>.

- <sup>37</sup> Dian 5 Februari 1999 <avi/abw>, 'Membangun Sebuah Kejujuran', dan Pos Kupang 24 Januari 1999 <gem/ady>, 'Malo: Jangan Biarkan saya sendiri'.
- <sup>38</sup> Kepala Staf Korps TNI-AAU Wilayah II Ujung Pandang, Marsekal Pertama PLD Leo Watimena dalam Pos Kupang 25 Januari 1999, 'AURI tidak mencopot Malo' <gem/ady>.
- <sup>39</sup> Diskusi dengan JP Potty, Wanukaka, Maret 1999.
- <sup>40</sup> Pos Kupang, 8 November 1998, 'FPDP Minta Bupati Malo Bertanggung Jawab'.
- <sup>41</sup> 'Bupati Malo Didesak Mundur', Pos Kupang 23 Desember 1998
- <sup>42</sup> Pos Kupang 24 Desember 1998, '4 Komcat Golkar desak FKP cabut dukungan kepada Malo'.
- <sup>43</sup> ibid
- <sup>44</sup> Pos Kupang 8 Januari 1999, 'Malo siap letakkan jabatan'.
- <sup>45</sup> Pos Kupang 9-11-1999, 'Kaditsospol NTT - Belum Ada Lampu Hijau dari Pangdam' <ady>.  
Pos Kupang 16 Januari 1999 'Danrem - Apa Penarikan Malo Tuntaskan Masalah' <ady/ery/kas>.  
KMD, 22 Januari 1999, 'Nasib Bupati Malo di Ujung Tanduk' <avi>.
- <sup>46</sup> Pos Kupang 13 Januari 1999, '322 Tokoh Desak berhentikan Malo'.
- <sup>47</sup> Dalam wawancaranya dengan kami pada bulan Maret 1999, Bupati Malo seringkali mengaitkan tindakannya pada instruksi dari atasan yang tidak disebut namanya.
- <sup>48</sup> Salah satunya, MUI, kemudian menarik pernyataannya dan mengambil posisi yang netral, lihat Pos Kupang 15 Februari 1999, '3413 Warga Sumba Barat Pertahankan Malo' <kas>.
- <sup>49</sup> Pos Kupang 15 Februari 1999, '3413 Warga Sumba Barat Pertahankan Malo' <kas>.
- <sup>50</sup> Wawancara dengan informan MK, Maret 1999
- <sup>51</sup> Kritik itu muncul dari mantan anggota DPRD I, N.D. Dokoe Bani S.Pd, di Pos Kupang 24 Januari 1999, 'Jangan Menari di atas Darah Rakyat' <gem>.
- <sup>52</sup> Pos Kupang 16 Februari, 'Bupati Malo akan memberi pertanggungjawaban khusus'.
- <sup>53</sup> Kelompok Pendukung Reformasi yang digambarkan dalam Pos Kupang 18 Februari 98, 'DPRD Didesak ....'
- <sup>54</sup> Pidato Ketua F-ABRI, Izaak Daris di depan DPRD II, yang diberitakan di Pos Kupang 16 Februari 1999, 'Bupati Malo Akan Memberi Pertanggungjawaban Khusus'.
- <sup>55</sup> Misalnya Ketua Komisi A (termasuk masalah hukum) DPRD I NTT Drs. Mell Adoe yang dikutip oleh Pos Kupang 17 Februari 1999, 'Aneh, keputusan DPRD Sumba Barat' <ady>.
- <sup>56</sup> Pos Kupang 19 Februari 1999, 'FABRI Melakukan Aksi Walk-Out'.
- <sup>57</sup> Lihat komentar dari dosen hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Umbu Rauta, Pos Kupang 18 Februari 1998, 'Perihal Tuntutan Pemberhentian Bupati Rudolf Malo', yang menjelaskan bahwa UU No. 5 tahun 1974 menegaskan bahwa Bupati berkewajiban mempertanggung-jawabkan pemerintahannya di depan DPRD, dan bahwa data-data temuan DPRD akan menjadi bahan pertimbangan Mendagri dalam membuat keputusannya.
- <sup>58</sup> Partai Kristen Indonesia.
- <sup>59</sup> Pos Kupang 21 Mei 1999, 'PDI Perjuangan Jadi Budak' <gem/art/eni/rus/pel/ati>.
- <sup>60</sup> Pos Kupang 28 Mei 1999, 'Di Waingapu Megawati Diserbu Massa Pendukung'.
- <sup>61</sup> Bukan keluarga Bupati; 'Malo' adalah nama yang sangat lazim dipergunakan di Sumba Barat
- <sup>62</sup> Dalam lapangan studi inilah kedua penulis mempunyai minat etnografi yang terus berlangsung. Lihat Istutiah Gunawan, RSPAS, ANU, Canberra (2000), 'Hierarchy and Balance: A Study of Wanokaka Social Organisation'.
- <sup>63</sup> Wawancara dengan J.L. Keremata, Juni 2000.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ir Datu Todu dan Weingu Bora.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Julianus Poteleba, Juni 2000.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Julianus Poteleba, Juni 2000.